# RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
## Kegiatan Penilikan Ke-3 S-PHL pada PBPH PT INHUTANI V Unit Lampung di Provinsi Lampung

a. Tanggal Audit : 6 – 13 Maret 2023
b. Metode : *Onsite Audit*
c. Kriteria Audit yang Digunakan : 1) Lampiran 1.3 Kepdirjen PHPLNo.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Penilaian Kinerja PHPL Pada Pemegang IUPHHK-HT
2) Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUPHHK-HT

## I. IDENTITAS LPVI

1. Nama LPVI : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Nomor Akreditasi : LPVI-017-IDN
3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4. Nomor Telpon : 0541-747798
   Email : trustindoprimakarya@gmail.com
5. Direktur : Ir Kurnia, IPU
6. Tim Audit : a) Ir. Suhardi (Auditor Prasyarat dan VLK Hutan / KTA)
   b) Wuri Pratini Hawiati, S.Hut. (Auditor Produksi)
   c) Dr. Ir. M. Taufan Tirkaamiana, MP. (Auditor Ekologi); dan
   d) Rr Arwita Andharu, S.Hut. (Auditor Sosial)
7. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

## II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : PT INHUTANI V UNIT LAMPUNG
2. Alamat Kantor : Graha Perhutani Lt. 16 Jl. T.B. Simatupang No. 22 Jatipadang, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
4. SK PBPH : No : 398/Kpts-II/1996 Tanggal 31 Juli 1996 Jo. No. 144/Kpts-II/1999 tanggal 19 Maret 1999 Jo. SK.1090/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2021 tanggal 17 November 2021
5. Luas dan Lokasi Areal Kerja : 56.547 Hektar di Kabupaten Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Pesawaran dan Lampung Utara, Provinsi Lampung
6. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Ir. Dicky Yuana Rady
   Komisaris Utama : Dr. Ir. Apik Karyana, M.Sc.
   Komisaris : Djohan Utama Perbatasari
   Plt. Komisaris : Ir. Raffles B. Panjaitan, M.Sc
7. Nama MR *Auditee* : Rahmat Usman

## III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-3

1. **Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian**

   Waktu : 6 Maret 2023
   Tempat : Bandar Lampung
   Ringkasan Catatan :
   a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Lampung dan BPHL Wilayah VI Bandar Lampung.
   b) Hasil pelaksanaan koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, memuat saran dan masukan dari masing-masing instansi serta informasi tambahan lainnya terkait *auditee*.

2. **Pertemuan Pembukaan**

   Waktu : 7 Maret 2023
   Tempat : Kantor PT Inhutani V Unit Lampung di Kota Bumi – Lampung Utara
   Ringkasan Catatan :
   a) Dihadir MR dan personil PT Inhutani V Unit Lampung yang ditugaskan mendampingi auditor.
   b) *Auditee* memahami dengan baik tujuan audit, kriteria audit yang digunakan dan ketentuan-ketentuan lainnya serta dapat melaksanakan audit sesuai *timeline* kegiatan audit yang ditetapkan.
   c) Pertemuan Pembukaan dibuatkan BAP dan Daftar Hadir menggunakan form P01-3.11 Rev.1 13/1/2021.

3. **Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

   Waktu : 7 – 12 Maret 2023
   Tempat : *On-site* / Lokasi areal kerja PT Inhutani V Unit Lampung di Provinsi Lampung
   Ringkasan Catatan :
   a) Pengumpulan data audit meliputi dokumen dan implementasinya di lapangan pada rentang waktu (2021, 2022 dan 2023) :
      - untuk indikator dan kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial standar penilaian kinerja PHPL; dan
      - standar verifikasi legalitas Kayu
   b) Audit dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan secara sampling kesesuain fisik atau lokasi kegiatan dengan pelaporan.
   c) Bukti audit yang terverifikasi dan analisis kesesuiannya dengan norma kematangan/pemenuhan verifier serta nilai yang diberikan, dicatat menggunakan form checklist audit, masing-masing form P01-3.12.a (Prasyarat), P01-3.12.b (Produksi), P01-3.12.c (Ekologi), P01-3.12.d (Sosial), dan P01-4b.09a (standar VLK).

4. **Pertemuan Penutupan**

   Waktu : 12 Maret 2023
   Tempat : Kantor PT Inhutani V Unit Lampung di Kota Bumi – Lampung Utara
   Ringkasan Catatan :
   a) Dihadir MR dan personil PT Inhutani V Unit Lampung yang ditugaskan mendampingi auditor.
   b) Tim auditor menyampaikan hasil penilaian kinerja PHPL baik pada indikator dan kriteria standar kinerja PHPL maupun verifier penyusun standar VLK, beserta kesimpulan audit dan penerbitan Catatan Ketidaksesuaian nya.
   *c)* *Auditee* menyetujui hasil penilian beserta temuan ketidaksesuaianya, dan menandatangani dokumen:
      - Berita Acara Pelaksanaan menggunakan form P01-3.15;
      - Kesimpulan Audit menggunakan form P01-3.13; dan
      - Catatan Ketidaksesuaian menggunakan form P01-3.14.

5. **Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian**

| | | |
|---|---|---|
| Waktu | : | 13 Maret 2023 |
| Tempat | : | Lampung |
| Ringkasan Catatan | : | a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Lampung dan BPHL Wilayah VI Bandar Lampung.<br>b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.<br>c) Hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 |

6. **Pengambilan Keputusan**

| | | |
|---|---|---|
| Tanggal | : | 5 April 2023 |
| Keputusan Penilaian | : | a) PT Inhutani V Unit Lampung dinyatakan telah LULUS penilaian kinerja PHPL dengan predikat **SEDANG** (nilai akhir kinerja PHPL mencapai **66,67%** tanpa verifier dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK); dan<br>b) Status S-PHL PT Inhutani V Unit Lampung dapat dipertahankan. |

## IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL

### 1. STANDAR PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HT

#### A. KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1 :

   Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 1.1.1 | : | Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HT, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja). |
| | Bobot | : | **Co-Dominan** |
| | Nilai | : | BAIK |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung memiliki izin pemanfaatan kayu hutan tanaman sebagai berikut :<br>1. SK Menhut No. 398/Kpts-II/1996 tanggal 13 Juli 1996 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas ± 55.157 (lima puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Kepada PT Inhutani V. SK ditandatangani Menteri Kehutanan atas nama Djamaludin Suryohadikusumo dan dilampiri dengan Peta Skala 1 : 50.000<br>2. SK Addendum Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 144/Kpts-II/1999 tanggal 19 Maret 1999 tentang Perubahan Keputusan Manteri Kehutanan No. 398/Kpts-II/1996 Tanggal 13 Juli 1996 yang mengubah luas areal menjadi seluas ± 56.547 Hektar terdiri dari Blok I (Register 44 seluas 32.373 Ha), Blok II (Register 42 seluas 12.729 Ha), Blok III (Register 46 seluas 10.055 Ha), dan Blok IV (Register 18 seluas 1.390 Ha). Terdapat Peta Lampiran Skala 1 : 50.000 pada 4 (empat) Blok/ Register yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan Dr. Ir. Muslimin Nasution tanggal 19 Maret 1999.<br>3. SK Addendum kedua SK PBPH sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1090/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2021 tanggal 17 November 2021 yang mengubah keputusan sebelumnya beserta lampiran dan peta lampirannya sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, dan hal lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan keputusan ini.<br>PT Inhutani V Unit Lampung telah melakukan penataan batas sepanjang 219.258,16 meter atau 100% dari rencana sepanjang ±220.080,47 meter dan dinyatakan telah temu gelang, dengan ketersediaan administrasi tata batas sebagai berikut :<br>1. Rencana Penataan Batas/ Pedoman Tata Batas No. 207/IHT-V/SP/4/2020 tanggal 13 April 2020 pada areal seluas ±56.547 Ha<br>2. Instruksi Kerja TBT No. INS.20/BPKH.XX/PKH.3.2/11/2020 tanggal 13 November 2020<br>3. Berita Acara Hasil Penataan Batas yang telah ditandatangani oleh para pihak.<br>4. Peta Hasil Penataan Batas Skala 1: 25.000 Register 42 (2 lembar); Register 44 (3 Lembar); Register 46 (1 Lembar); dan Register 18 (1 Lembar).<br>5. Bulu Laporan TBT No. LAP.2/BPKH.XX/PKH.3.2/2021 yang telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atas nama Dirjen Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan Herban Heryandana, S.Hut. M.Sc. tanggal 17 Juni 2021.<br>6. Surat Direksi PT Inhutani V Lampung No. 480/IHT-V/Prod/8/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penyampaian Usulan Penetapan Areal IUPHHK-HTI PT Inhutani V Lampung kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Cq Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutaan. Surat berisi pemberitahuan bahwa PT Inhutani V lampung telah menyelesaikan tata batas areal IUPHHK-HTI seluas 55.157 Ha dan telah terbit Laporan TBT No. LAP.2/BPKH.XX/PKH.3.2/2021 pada Februari 2021 dan permintaan agar areal kerja ditetapkan |

<table>
<tr><td rowspan="4">2.</td><td>Verifier 1.1.2</td><td>:</td><td>Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).</td></tr>
<tr><td>Bobot</td><td>:</td><td>Dominan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>BAIK</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Inhutani V Unit Lampung telah melakukan penataan batas sepanjang 219.258,16 meter atau 100% dari rencana sepanjang ±220.080,47 meter dan dinyatakan telah temu gelang, sebagaimana tercantum pada dokumen laporan hasil pelaksanaan penataan batas No. LAP.2/BPKH.XX/PKH.3.2/2021. Realisasi pemancangan batas PT Inhutani V Unit Lampung sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Blok</th><th>Rencana</th><th>Realisasi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Register 42</td><td>52.412,06</td><td>52.221,66</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Register 44</td><td>103.858,63</td><td>103.490,66</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Register 46</td><td>48.683,05</td><td>48.535,51</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Register 18</td><td>15.126,73</td><td>15.010,33</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>220.080,47</td><td>219.258,16</td></tr>
</table>
Sumber : Laporan TBT No. LAP.2/BPKH.XX/PKH.3.2/2021<br>
Terdapat kegiatan pemeliharaan batas di masing-masing register sebagai berikut :<br>
1. BAP Pemeliharaan Pal/ Patok Batas Kawasan Hutan Register 44 No. 69/IHT-V/Lmp/Reg44-TBB/BA/06/2022 tanggal 08 Juni 2022. Identifikasi dan Pemeliharaan batas di Register 44 diketahui dari 803 Patok Batas yang ada terdapat 717 Pal/ Patok yang masih dalam kondisi baik dan 86 Pal/ Patok kondisinya rusak/ hilang/ tidak ditemukan.<br>
2. BAP Pemeliharaan Pal/ Patok Batas Kawasan Hutan Register 42 No. 240/IHT-V/Lmp/Reg42/BA/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 pada batas sepanjang 5,6 Km sebanyak 57 Patok Batas dengan membersihkan gulma di sekitar pal batas/patok.<br>
Hasil observasi lapangan ditemukan terdapat pemeliharaan batas berupa pembersihan batas sepanjang jalur pemeliharaan dengan koordinat sebagai berikut :<br>
1. Pengecekan batas dan pemeliharaan pada Register 44 untuk Patok Batas No. 479 sampai dengan No. 469 diverifikasi di lapangan masih terdapat patok terbuat dari beton cor ukuran 10 x 10 yang terpasang baik pada batas luar di koordinat 04° 18’ 07,6” S dan 104° 52’ 21,4” E sampai dengan koordinat 04° 18’ 14,1” S dan 104° 52’ 37,4” E.<br>
2. Pengecekan pemeliharaan batas pada Register 44 dijumpai masih terdapat Patok Batas No. 492 kawasan hutan produksi dengan APL pada koordinat 04° 18’ 04,7” S dan 104° 51’ 59,6” E. Di lapangan dijumpai adanya Pal Batas dan Plang Areal PT Inhutani V Unit Lampung dengan kondisi masih terjaga.<br>
3. Pengecekan batas dan pemeliharaan pada Register 42 untuk Patok Batas No. 456 pada koordinat 04° 27’ 42,2” S dan 104° 31’ 40,1” E sampai dengan No. 466 pada koordinat 04° 27’ 03,0” S dan 104° 31’ 44,3” E diverifikasi di lapangan masih terdapat patok terbuat dari beton cor ukuran 10 x 10 yang terpasang baik pada batas luar.<br>
4. Pengecekan pemeliharaan batas pada Register 42 kawasan hutan produksi dengan APL pada koordinat 04° 28’ 59,9” S dan 104° 32’ 13,5” E. Di lapangan dijumpai adanya Plang Areal PT Inhutani V Unit Lampung dengan kondisi masih terjaga.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">3.</td><td>Verifier 1.1.3</td><td>:</td><td>Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)</td></tr>
<tr><td>Bobot</td><td>:</td><td>Dominan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>SEDANG</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pemancangan batas telah dilaksanakan di lapangan dan BATB sudah ditandatangani para pihak dan pada areal PT Inhutani V Unit Lampung diketahui tidak terdapat tumpang tindih batas dengan perizinan pihak lain.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
Namun demikian berdasarkan hasil wawancara dengan PIC Prasyarat dan observasi lapangan, diketahui bahwa selama periode audit masih terdapat konflik berupa kegiatan okupasi lahan oleh masyarakat untuk kegiatan pemukiman, perladangan, perkebunan tebu dan singkong serta tanaman lainnya.<br>
PT Inhutani V Unit Lampung memiliki data dan dokumen hasil identifikasi areal konflik dan peta penggarapan lahan oleh masyarakat di dalam areal PT Inhutani V Unit Lampung yang menggambarkan bahwa di areal PBPH PT Inhutani V Unit Lampung masih terdapat konflik dan okupasi lahan dengan kondisi sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Register</th><th rowspan="2">Luas (Ha)</th><th colspan="2">Konflik (Ha)</th><th colspan="3">Mitra (Ha)</th></tr>
<tr><th>Okupasi</th><th>Tambang</th><th>PSMI</th><th>PML</th><th>KTH</th></tr>
<tr><td>1</td><td>18</td><td>1.390</td><td>1.175,69</td><td>45,00</td><td>-</td><td>-</td><td>169,31</td></tr>
<tr><td>2</td><td>42</td><td>12.737</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>7.760,38</td><td>4.966,62</td></tr>
<tr><td>3</td><td>44</td><td>32.375</td><td>22.655,62</td><td>-</td><td>1.023,70</td><td>-</td><td>8.695,91</td></tr>
<tr><td>4</td><td>46</td><td>10.055</td><td>3.055,73</td><td>-</td><td>-</td><td>3.436,84</td><td>3.454,63<br>107,80*)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Jumlah</td><td rowspan="2">56.547</td><td>26.886,81</td><td>45,00</td><td>1.023,70</td><td>11.197,22</td><td>17.394,27</td></tr>
<tr><td colspan="2">26.931,81</td><td colspan="3">29.615,19</td></tr>
</table>
*) Areal Litbang<br>
PT Inhutani V Unit Lampung diverifikasi telah melakukan upaya untuk menyelesaikan konflik lahan dan okupasi lahan dengan menerapkan pola kemitraan sesuai PermenLHK No 9 tahun 2021 namun PT Inhutani V Unit Lampung belum menyusun laporan identifikasi dan resolusi konflik sesuai dengan Perdirjen PHPL No P/5 tahun 2016 atau Lampiran V PermenLHK No 8 Tahun 2021.<br>
Hasil observasi lapangan diketahui bahwa di lapangan masih terdapat kegiatan okupasi lahan di areal PT Inhutani V untuk kegiatan perladangan, perkebunan, pertanian dan pemukiman pada masing masing register yang sebagian sudah diselesaikan dengan pola kemitraan melalui pembentukan Kelompok Tani Hutan dan yang lainnya masih terus diupayakan untuk penerapan program kemitraannya.
</td></tr>
<tr><td rowspan="4">4.</td><td>Verifier 1.1.4</td><td>:</td><td>Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi Kawasan dan atau luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable).</td></tr>
<tr><td>Bobot</td><td>:</td><td>Co-Dominan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pada areal PBPH PT Inhutani V Unit Lampung diverifikasi tidak terjadi perubahan fungsi kawasan maupun perubahan luas areal sesuai dengan peta overlapping areal PBPH PT Inhutani V Unit Lampung dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Lampung Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2017 skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.8196/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 dan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Lampung Skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000).</td></tr>
<tr><td rowspan="4">5.</td><td>Verifier 1.1.5</td><td>:</td><td>Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable).</td></tr>
<tr><td>Bobot</td><td>:</td><td>Co-Dominan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>SEDANG</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Hasil verifikasi diketahui bahwa pada areal PBPH-HT PT Inhutani V Unit Lampung tidak terdapat penggunaan lahan di luar sektor kehutanan berupa PPKH untuk pertambangan dan izin IUP perkebunan serta perusahaan lainnya, namun terdapat penggunaan lahan oleh masyarakat</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | berupa pemukiman, perladangan, perkebunan masyarakat seperti singkong, tebu, karet, kelapa sawit dan lain lain.<br>Areal yang digunakan untuk perladangan dan pertanian masyarakat sebagian telah diupayakan untuk menerapkan pola kemitraan, namun masih banyak yang belum diselesaikan dengan pola kemitraan sejumlah 26.931,81 Ha, sebagaimana data pada verifier 1.1.3 |
| 6. | Verifier 1.1.6 | | Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK |
| | Bobot | | **Dominan** |
| | Nilai | | SEDANG |
| | Ringkasan Justifikasi | | Pada areal PT Inhutani V Unit Lampung terdapat penguasaan lahan oleh masyarakat yang merupakan potensi konflik tenurial. Identifikasi dan monitoring penggunaan lahan dan potensi konflik belum seluruhnya dilakukan dan belum terdapat pelaporan identifikasi dan resolusi konflik yang mengacu kepada Lampiran V PermenLHK No. 8 Tahun 2021.<br>Hasil inventarisasi areal konflik diketahui masih terdapat areal yang belum dikuasai sepenuhnya oleh PBPH PT Inhutani V Unit Lampung dengan luas areal 26.931,81 Ha sebagaimana telah diuraikan pada verifier 1.1.3.<br>Dengan demikian pada areal PBPH PT Inhutani V Unit Lampung diverifikasi masih terdapat konflik maupun penguasaan lahan oleh pihak lain dan diverifikasi hasil identifikasi seluas 26.931,81 Ha sehingga secara keseluruhan areal masih dikuasasi seluas 56.547 Ha – 26.931,81 Ha = 29.615,19 Ha (52,37%). |
| Nilai Kinerja Indikator 1.1 | | : | **SEDANG** dengan nilai mencapai 79,17%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

2. Indikator 1.2 :
   Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 1.2.1 | : | Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan |
| | Bobot | : | **Co-Dominan** |
| | Nilai | : | BAIK |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat dokumen visi dan misi yang telah disahkan oleh Direksi PT Inhutani V Unit Lampung dengan SK Nomor 71/IHT-V/Kpts/2019 tanggal 8 Februari 2019 dan selama periode audit penilikan ke-3 dokumen Visi dan Misi tlah ditetapkan kembali sesuai oleh Direktur Utama PT Inhutani V Unit Lampung sesuai dengan SK Nomor 203/IHT-V/Kpts/2022 tanggal 1 April 2022. Hasil verifikasi dokumen visi dan misi PT Inhutani V Unit Lampung seluruhnya telah sesuai dengan kaidah PHL dengan visi dan misi mengedepankan pola kemitraan serta pelibatan masyarakat setempat untuk membangun hutan tanaman dan tanaman semusim.<br>Visi dan Misi PT Inhutani V Unit Lampung telah disosialisasikan kepada karyawan melalui pemasangan dokumen visi misi di kantor dan tempat lainnya, melalui website www.inhuani5.co.id dan sosialisasi secara langsung sesuai BAP Sosialisasi tanggal 6 April 2022 yang dilakukan secara hybrid baik luring maupun daring.<br>Demikian pula kepada masyarakat telah dilakukan sosialisasi visi dan misi sesuai dengan BAP sosialisasi Visi dan Misi, RKT, Karhutla, Kemitraan dan Kelola Sosial serta Pengenalan Kawasan Lindung Dalam Kawasan Hutan Produksi PT Inhutani V Unit Lampung yang dilakukan kepada masyarakat. |
| 2. | Verifier 1.2.2 | : | Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL. |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | SEDANG |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ringkasan Justifikasi | : | Visi dan misi PT Inhutani V Unit Lampung telah diimplementasikan dalam kegiatan operasional, namun dinilai belum seluruhnya.<br>1. Misi terkait pelibatan masyarakat setempat untuk membangun hutan tanaman dan tanaman semusim dalam rangka kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat telah diimplementasikan dalam program kemitraan pada semua Register walaupun belum seluruhnya dan masih banyak areal yang digarap oleh masyarakat dan belum bermitra.<br>2. Misi untuk mempertegas dan perjelas batas kawasan hutan sebagai areal konsesi telah diimplementasikan dengan melakukan penataan batas areal yang sudah temu gelang sepanjang 219.258,16 meter atau 100% dari rencana sepanjang ±220.080,47 meter, sebagaimana tercantum pada dokumen laporan hasil pelaksanaan penataan batas No. LAP.2/BPKH.XX/PKH.3.2/2021.<br>3. Misi terkait penerapan teknologi tinggi dalam rangka optimalisasi hasil hutan tanaman masih belum diimplementasikan mengingat pencapaian penanaman dan pembangunan hutan tanaman masih belum maksimal sesuai dengan rencana dan masih banyak terdapat kendala permasalahan sosial di lapangan.<br>4. Misi untuk memupuk keuntungan yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan terus diimplemenasikan walaupun penilaian terhadap keuangan perusahaan dinilai belum dapat dikatakan baik. |
| 3. | Verifier 1.2.3 | : | Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan |
| | Bobot | : | **Co-Dominan** |
| | Nilai | : | SEDANG |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung telah memiliki Tenaga Teknis Kehutanan (GANISPH) yang terdiri dari GANISPH Canhut 2 orang; GANISPH Binhut 1 orang; GANISPH Nenhut 1 orang; dan GANISPH PKB-R 2 orang. Sedangkan untuk GANISPH Kurpet masih belum tersedia karena yang sebelumnya telah resign pada tahun 2022.<br>Mengacu kepada Visi dan Misi, Struktur Organisasi. Luas areal pada 4 (empat) register dan simpul pengelolaan hutan lestari serta PUHH,PT Inhutani V Unit Lampung dinilai masih perlu menambah jumlah GANISPH khususnya pada kompetensi Kurpet, Nenhut dan Binhut.<br>Kepemilikan GANISPH PT Inhutani V Unit Lampung dibandingkan dengan kebutuhan di lapangan baru mencapai 53,85 % (tersedia 7 orang dari 13 sesuai kebutuhan dan simpulnya). Di samping itu, penempatan personil GANISPH pada jabatan di struktur organisasi dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensinya. |
| 4. | Verifier 1.2.4 | : | Peningkatan kompetensi SDM |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | SEDANG |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan verifikasi data rencana dan realisasi peningkatan kompetensi SDM GANISPH PT Inhutani V Unit Lampung 2022 sebesar 100 % terdiri dari pelatihan GANISPH dan Uji Kompetensinya. Sedangkan untuk tahun 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 baru direalisasikan 1 orang yang melakukan Diklat GANISPH Canhut atas nama Adam Hasrul Amir atau 33,33% dari rencana 3 orang yang akan direncanakan. Realisasi lainnya akan dilakukan pada tahun 2023 apabila terdapat penyelenggaraan Diklat GANISPH oleh instansi terkait.<br>Kekurangan GANISPH Kurpet dan perlunya penambahan GANISPH Binhut dalam organisasi tidak dimasukan sebagai rencana pendidikan dan latihan untuk peningkatan kompetensi karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi yang sudah terverifikasi pada kegiatan penilikan tahun sebelumnya |
| 5. | Verifier 1.2.5 | : | Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan. |
| | Bobot | : | **Dominan** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Nilai | : | BAIK |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung telah memiliki dokumen ketenagakerjaan terkait GANISPH dan tenaga profesional kehutanan di lapangan yaitu :<br>1. Ijazah dan sertifikat pelatihan<br>2. Kartu GANISPH<br>3. SK Persetujuan penugasan GANISPH<br>4. SK Penempatan GANISPH.<br>5. Sertifikat Uji Kompetensi<br>6. Pengangkatan sebagai karyawan dan penempatan pada Struktur Organisasi<br>7. Pemenuhan terhadap ketentuan normatif ketenagakerjaan seperti penerapan gaji, BPJS, fasilitas camp dan kesejahteraan karyawan, jenjang karir serta pengaturan hak dan kewajiban dalam PKB. |
| Nilai Kinerja Indikator 1.2 | | : | **SEDANG** dengan nilai mencapai 79,17%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

3. Indikator 1.3 :
   Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 1.3.1 | : | Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | SEDANG |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung telah memiliki Struktur Organisasi yang telah disahkan oleh Direktur Utama No. 450/IHT-V/Kpts/2020 tanggal 28 Agustus 2020. Seiring dengan berkembangnya organisasi dan perubahan manajemen terkait dengan kebijakan Kementerian BUMN untuk menggabungkan (Merger), maka Struktur Organisasi PT Inhutani V berubah dan disesuaikan dengan kondisi terkini sebagaimana Keputusan Direksi Nomor. 945/IHT-V/Kpts/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja PT Inhutani V Tahun 2022<br>Struktur Organisasi PT Inhutani V Unit Lampung dinilai telah sesuai dengan kerangka PHL, namun khusus untuk Unit Manajemen Lampung walaupun sudah terdapat Kabag Teknis dan Manager Lampung dinilai masih perlu diperkuat dengan jabatan teknis yang menangani masalah pembangunan HTI khususnya budidaya tanaman sebagaimana SK Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman. |
| 2. | Verifier 1.3.2 | : | Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana. |
| | Bobot | : | **Co-Dominan** |
| | Nilai | : | BAIK |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung memiliki peralatan dan personil operator untuk mengoperasikan sistem informasi di lapangan maupun di kantor.<br>Karena lokasi areal PT Inhutani V Unit Lampung pada Register 18, Register 42, Register 44 dan Register 46 yang cukup terbuka dan telah dijangkau oleh jaringan internet seluler, maka pengelolaan sistem informasi menggunakan perangkat email dan surat yang dapat dikirimkan melalui jaringan seluler, termasuk di dalamnya penggunaan grup-grup what's app untuk memudahkan komunikasi dan pengiriman data dari lapangan ke kantor di Kotabumi maupun ke kantor Jakarta dan sebaliknya.<br>Demikian pula untuk mengelola sistem pelaporan pengelolaan hutan dari kementerian LHK dan instansi lainnya dapat dilakukan dari kantor Register dan Kantor Unit di Kotabumi serta komunikasi dan pengiriman data ke kantor Jakarta dinilai lancar karena terdapat jaringan internet yang baik. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Verifier 1.3.3 | : | Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | SEDANG |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Operator SIM Kementerian LHK ditetapkan dengan SK Direktur Utama PT Inhutani V Unit Lampung sebagai berikut :<br>a. Operator SICAKAP ditunjuk atas nama Roy Satia Nugroho dan M. Salman Faisal sesuai dengan keputusan Direksi No. 1399/IHT-V/Kpts/2022 tanggal 28 Desember 2022.<br>b. Operator dan Sub Operator SIGANISHUT ditunjuk atas nama M. Salman Faisal sesuai dengan keputusan Direksi No. 27/IHT-V/Kpts/2023 tanggal 22 Januari 2023.<br>c. Operator SEHATI ditunjuk atas nama Adam Hasrul Amir sesuai dengan keputusan Direksi No. 216/IHT-V/Kpts/2023 tanggal 27 Februari 2023, namun saat ini pelaporannya digabungkan dengan pelaporan pada aplikasi SICAKAP.<br>d. Operator SIPONGI ditunjuk atas nama Adam Hasrul Amir sesuai dengan keputusan Direksi No. 209/IHT-V/Kpts/2023 tanggal 24 Februari 2023,<br>e. Operator SIPUHH ditunjuk atas nama Yogi Fermana sesuai dengan keputusan Direksi No. 28/IHT-V/Kpts/2023 tanggal 27 Januari 2023. Dan Operator SIPNBP ditunjuk atas nama Yogi Fermana sesuai dengan keputusan Direksi No. 202/IHT-V/Kpts/2023 tanggal 23 Februari 2023<br>Hasil verifikasi terhadap kepatuhan pelaksanaan pelaporan pada sistem informasi Kementerian LHK selama tahun 2021, 2022 dan 2023 dinilai telah patuh melaksanakan kewajiban pelaporannya, namun pengisian pelaporan masih perlu diperbaiki terutama kelengkapan data pelaporan terkait sarana prasarana dan SDM termasuk informasi keuangan perusahaan. |
| 4. | Verifier 1.3.4 | : | Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya. |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | SEDANG |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Organisasi SPI telah ditetapkan pada Struktur Organisasi PT Inhutani V secara keseluruhan sebagaimana keputusan Direksi No. 450/IHT-V/Kpts/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan disesuaikan dengan kondisi terkini sebagaimana Keputusan Direksi Nomor. 945/IHT-V/Kpts/2022 tanggal 24 Oktober 2022.<br>Selama periode audit terdapat laporan SPI yang memeriksa pada kegiatan operasional dan non operasional dengan hasil temuan tahun 2022 pada kegiatan :<br>1. Pencapaian RKAP Triwulan I/ Maret tahun 2022<br>2. Swakelola Tebu Register 44 Tulang Bawang Barat<br>3. Trading Singkong<br>4. Kerjasama Penanaman Alpokat Register 18<br>5. Pengadaan Lapak Singkong Register 46<br>Hasil monitoring dan evaluasi selama setahun terakhir tidak dilakukan pada aspek operasional pada kegiatan persiapan lahan THPB dan penanaman tanaman budidaya kayu HTI seperti Sengon dan Karet termasuk organisasi dan kendala yang selama ini dirasakan menghambat bidang operasional seperti masalah kejasama dengan mitra dan permasalahan penguasaan lahan oleh masyarakat, persiapan lahan dan penanaman HTI, persemaian HTI dan pemeliharaan tanaman HTI masih belum dijangkau.<br>Dengan demikian personil SPI PT Inhutani V Unit Lampung telah ditunjuk, namun dinilai masih belum efektif untuk dapat menjangkau seluruh tahapan kegiatan baik operasional maupun non operasional. |
| 5. | Verifier 1.3.5 | : | Adanya Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Bobot | : | **Co-Dominan** |
| | Nilai | : | SEDANG |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil temuan SPI PT Inhutani V Unit Lampung telah disampaikan kepada auditi dan telah ditindaklanjuti dengan membuat rencana tindakan/ action plan pada masing-masing temuan. Diverifikasi terdapat beberapa kegiatan yang masih belum diselesaikan pada saat laporan SPI disusun seperti rekomendasi pendekatan kepada masyarakat, dan PT PML yang belum selesai dan terus berproses, penataan areal tebu, trading singkong, penanaman alpokat di register 18 dan pembelian lapak singkong,<br>Dengan demikian hasil temuan SPI telah disampaikan kepada Direksi dan telah ditindaklanjuti di lapangan dengan tindakan perbaikan pada sebagian temuan SPI. |
| Nilai Kinerja Indikator 1.3 | | : | SEDANG dengan nilai mencapai 70,63%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

4. Indikator 1.4 :

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 1.4.1 | : | Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya |
| | Bobot | : | **Co-Dominan** |
| | Nilai | : | SEDANG |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai dari pihak yang berwenang dan juga dari perwakilan masyarakat desa di sekitar.<br>PT Inhutani V Unit Lampung telah menerapkan kegiatan persetujuan awal tanpa paksaan kepada masyarakat desa terdampak dari kegiatan penebangan dan penanaman RKT tahun 2021 dan tahun 2022 dengan melakukan sosialisasi di desa pada register 44, 42 dan register 18. Namun demikian diverifikasi dari daftar hadir dan BAP yang ada tidak terdapat kehadiran dari seluruh masyarakat Desa sekitar.<br>Pada kegiatan tersebut telah disosialisasikan rencana kegiatan pemanfaatan kayu pada RKTPH 2022 PT Inhutani V Unit Lampung dan informasi lainnya kepada perwakilan masyarakat dan kelompok tani hutan.<br>Dengan demikian kegiatan yang mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi yang memadai kepada masyarakat serta terdapat bukti dokumen pelaksanaannya. |
| 2. | Verifier 1.4.2 | : | Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD |
| | Bobot | : | **Co-Dominan** |
| | Nilai | : | SEDANG |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung memiliki rencana kelola sosial tahun 2022 dan tahun 2023 yang tertuang dalam dokumen RKTPH tahun 2022 dan tahun 2023 dan telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat atas dasar informasi awal yang memadai dari perwakilan desa di sekitar areal PBPH PT Inhutani V Unit Lampung.<br>Terkait rencana kelola sosial serta hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan pemanfaatan areal kepada setiap desa binaannya telah dilakukan sosialisasi sesuai dengan dokumen BAP sosialisasi yang ada. Namun diverifikasi dari daftar hadir dan BAP yang ada tidak terdapat dokumentasi kehadiran dari perwakilan masyarakat di register 46 (75%). |
| 3. | Verifier 1.4.3 | : | Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung |
| | Bobot | : | **Dominan** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Nilai | : | SEDANG |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Proses penetapan kawasan lindung telah disosialisasikan dan mendapat persetujuan dari masyarakat setempat serta mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai dari desa di sekitar areal PBPH PT Inhutani V Unit Lampung sesuai dengan dokumen Berita Acara Sosialisasi tahun 2021 dan tahun 2022.<br>Namun demikian terkait sosialisasi kawasan lindung telah dilakukan sosialisasi sesuai dengan dokumen BAP sosialisasi yang ada. Namun diverifikasi dari daftar hadir dan BAP yang ada tidak terdapat dokumentasi kehadiran dari perwakilan masyarakat di register 46 (75%). |
| Nilai Kinerja Indikator 1.4. | | : | SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

## B. KRITERIA PRODUKSI

5. Indikator 2.1 :
   Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 2.1.1 | : | Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Baik |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PBPH HP PT Inhutani V Unit Lampung telah mempunyai Dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018-2027 dan peta lampirannya, yang telah disahkan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5045/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2018-2027 Atas Nama PT Inhutani V di Provinsi Lampung, berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2027, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 Agustus 2018 ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Ttd Dr. Hilman Nugroho (NIP. 19590615 198603 1 004).<br>Tata ruang areal kerja pada PBPH HP PT Inhutani V Unit lampung pada RKUPHHK HT Periode 2018-2027 sebagai berikut :<br>• Kawasan lindung seluas 6.431 Ha atau 11,37 %.<br>• Tanaman Pokok seluas 33.941 Ha atau 60,08 %.<br>• Tanaman Kehidupan seluas 16.146 Ha Atau 28,55%.<br>• Luas areal PBPH HP seluas 56.547 Ha . |
| 2. | Verifier 2.1.2 | : | Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan tinjauan dokumen dan observasi lapangan bahwa Implementasi penataan areal kerja berdasarkan tata ruang HTI dilapangan hanya sebagian tidak sesuai dengan RKUPHHK ≤ 50%, dengan uarain sebagai berikut :<br>• Rata-rata kesesuaian luas penataan areal kerja sebesar 56,03%. Rencana Luas RKT 2021,2022 dan 2023 pada dokumen RKU seluas 14.642 Ha dan dan dalam dokumen RKT seluas 5.945 Ha.<br>• Lokasi Blok RKT 2021, 2022, 2023 sebagian belum sesuai dengan perencanaan jangka panjang. Seperti RKT 2022 lokasi tanaman kehidupan dalam RKU dengan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | kode blok V, tetapi dalam RKT terdapat dalam blok I-X,II-X, III-X,IV-X dan untuk lokasi tanaman pokok terdapat kesesuaian pada blok V/X. |
| 3. | Verifier 2.1.3 | : | Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%). |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tanda batas blok dan petak kerja RKT hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan.<br>• Tanda batas blok RKT 2023 terlihat pada Register 46 ,44 dan 42 berupa plang RKT 2023 berupa tanaman sengon dan karet terlihat jelas di lapangan.<br>• Tanda batas petak berupa patok yang terbuat dari kayu dengan cat warna merah dan tulisan putih , sebagian terlihat jelas di lapangan. Beberapa batas petak identitasnya tidak lengkap seperti identitas pada patok batas petak RKT 2023 register 46 petak 60,59,64, 65 dan ada beberapa patok batas petak tidak ditemukan di lapangan seperti tanda petak 86 dan 64 Regsiter 46. Hal ini disebabkan karena adanya konflik tenurial dengan masyarakat. |
| Nilai Kinerja Indikator 2.1 | | : | **SEDANG** dengan Nilai mencapai 77,78% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

6. Indikator 2.2 :
   Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 2.2.1 | : | Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan) |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung telah memiliki data potensi tegakan dalam satu tipe ekosistem hutan yaitu hutan mineral dengan didukung data survei potensi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2020, 2021 dan 2023 dan untuk tahun 2022 tidak ada kegiatan survey potensi untuk hutan tanaman karena tidak ada target pemanenan pada hutan tanaman dan Unit Manajemen juga belum memiliki kelengkapan peta pendukungnya seperti peta jalur survey. |
| 2. | Verifier 2.2.2 | : | Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume) |
| | Bobot | : | CD |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat data hasil pengukuran riap tegakan/PSP untuk seluruh tipe ekosistem yang ada dan telah dianalisis . Hasil Pengukuran PUP meliputi Register 46, jenis *Acacia mangium* pada petak 57 dengan tahun tanam 2019, Pengukuran PUP Register 46, jenis Sengon laut, pada petak 40, dengan tahun tanam 2017 dan Pengukuran PUP Register 46, Jenis Karet pada petak 66 dengan tahun tanam 2014. Dan hasil analisis sudah disampaikan kepada Puslitbang Palembang di Bandar Lampung, namun hasil analisis belum digunakan sebagai dasar perhitungan rencana panen. |
| Nilai Kinerja Indikator 2.2 | | : | **SEDANG** dengan Nilai mencapai 66,67% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

7. Indikator 2.3 :
   Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 2.3.1 | : | Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | • SOP seluruh tahapan sistem silvikultur THPB yang diterapkan di PT Inhutani V Unit Lampung, tersedia dengan lengkap terdiri dari SOP PAK,Inventarisasi, PWH, Persemaian, pembibitan persiapan lapangan , penyaiapan lahan,penanaman, pemeliharaan tanaman, penebanagan, pemanenan, pengaman dan perlindungan hutan tetapi belum seluruhnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis, seperti SOP Inventarisasi dan pemanenan.<br>• Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara dengan pendamping bahwa implementasi SOP baru sebagian di lapangan. Beberapa kegiatan yang belum terimplementasi sesuai target misalnya penanaman dan pemanenan. |
| 2. | Verifier 2.3.2 | : | Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terdapat data sebagai berikut :<br>• Data hasil pengukuran tanaman *Acacia sp* umur 54 bulan, pada pengukuran tahun 2022, dengan Nilai MAI 35,20 M3/Ha/th maka untuk daur 6 tahun potensi perha menjadi 211,2 $m^3$ (≥ 120 $m^3$/ha)<br>• Berdasarkan proyeksi potensi/Ha untuk tanaman *Acacia* sp hasil pengukuran tahun 2023 potensi sebesar 69,28 M3/Ha, sehingga rata-rata potensi sebesar 140,24 m3/Ha.<br>• Data proyeksi pertumbuhan dan riap *Acacia sp* belum dilengkapi dengan data informasi Jarak Tanam, Intensitas Sampling, Luas Plot, Jumlah Pohon per Hektar dan rata-rata volume per pohon.<br>• Untuk tanaman sengon berdasarkan hasil LHC tahaun 2021 sebesar 76,83 M3/Ha dan tahun 2023 sebesar 48,57 M3/Ha atau rata-rata sebesar 62,7 M3/Ha. |
| 3. | Verifier 2.3.3 | : | Tingkat kecukupan potensi permudaan |
| | Bobot | : | CD |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (≥ 75-89%) dari jumlah tanaman perhektar`sesuai jarak tanam yang dipergunakan. Untuk tanaman sengon untuk umur 18 bulan mempunyai stocking tanaman sebesar 84,05% dan Untuk tanaman *Acacia sp* umur 18 bulan mempunyai stocking sebesar 90,53%. |
| 4. | Verifier 2.3.4 | : | Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat struktur tegakan hutan tanaman pada semua kelas umur tetapi sebaran luas tidak merata (kurang dari 60-79%) sampai masak tebang. Daur yang digunakan adalah 6 (enam) untuk tanaman sengon, *Acacia sp*, *eucalyptus* dan kemerataannya mencapai 70,28%. |
| Nilai Kinerja Indikator 2.3 | | : | **SEDANG** dengan Nilai mencapai 66,67% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

8. Indikator 2.4 :
Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 2.4.1 | : | Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan tetapi isinya belum seluruhnya sesuai dengan karakteristik biofisik setempat dan belum seluruhnya terimplementasi di lapangan. SOP tersebut meeliputi :<br>• SOP Penebangan Nomor Dokumen: 148.G/IHT-V/SOP/2/2023, disahkan oleh SEVP Operasional, tanggal 8 Februari 2023<br>• SOP untuk kegiatan PAK dengan No 82.c/IHT-V/SOP/2/2019 terbit tanggal 11 Februari 2019.<br>• SOP Inventarisasi dengan No. 933/IHT-V/SOP/10/2022 Distujui SEVP Operasional 19 Oktober 2022. Isi SOP belum mencerminkan hutan tanaman .<br>• SOP Pemanenan Kayu No.932/IHT-V/SOP/10/2022 disahkan tanggal 19 Oktober 2022 oleh SEVP Operasional. belum sesuai dengan kondisi hutan tanaman.<br>• Pada saat observasi lapangan belum ada kegiatan produksi hutan tanaman dan direncanakan pada tahun 2023 akan dilakukan kegiatan produksi kayu sengon dengan target 874,37 M3 seluas 18 Ha. |
| 2. | Verifier 2.4.2 | : | Limbah pemanfaatan hutan minimal |
| | Bobot | : | CD |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil pengukuran Faktor Eksploitasi melalui hasil realisasi produksi pada petak 75,78,87,88,89,98,99,100,106,107,108,109, 121,122,123,125 di Register 42 dengan Faktor Eksploitasi sebesar 89,18%, namun hasil pengukuran limbah tebangan masih menggunakan parameter data Laporan Hasil Cruising (LHC) atau data perkiraan potensi tegakan . Perusahaan belum mengimplementasikan prosedur Residual wood Assesment No. 153e/IHT-V/SOP/02/2023 tanggal 7 Februari 2023. |
| Nilai Kinerja Indikator 2.4 | | : | **SEDANG** dengan Nilai mencapai 66,67% , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

9. Indikator 2.5 :
Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 2.5.1 | : | Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/ RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/ RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, *self approval*). |
| | Bobot | : | CD |
| | Nilai | : | Baik |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yaitu RKT 2021, 2022 dan 2023 yang disusun berdasarkan RKU periode 2018-2027 dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval,* Sebagai berikut :<br>• Dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018-2027 yang telah disahkan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5045/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018<br>• RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 disahkan tanggal 30 Desember 2020 oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melalui SK No. 97/V.24/B.IV.2/2020 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | • RKTUPHHK-HTI Tahun 2022 disahkan tanggal 29 Desember 2021oleh Direktur Utama PT Inhutani V Unit Lampung melalui SK No. 834/IHT-V/Kpts/2021<br>• RKTPH-HP Tahun 2023 disahkan tanggal 29 Desember 2022 oleh Direktur Utama PT Inhutani V (unit Lampung) melalui SK No. 1.404/IHT/V/RKT-Lmp/12/2022 |
| 2. | Verifier 2.5.2 | : | Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Penggambaran peta telah sesuai dengan PermenLHK Nomor: P.12/MenLHK-II/2015 tanggal 24 Maret 2015, Pasal 9 bahwa pewarnaan dalam peta tat ruang HTI : (a) Tanaman Pokok berwarna kuning, (b) Tanaman Kehidupan berwarna hijau, sarana prasarana berwarna coklat dan (c) kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya berwarna merah, namun masih terdapat ketidaksesuaian penggambaran antara peta RKUPHHK dengan peta RKTUPHHK di Register 18, 46, 42 dan 44.<br>• Ketidaksesuaian di Register 18 adalah di peta RKT 2022 dan 2023 sudah tidak ada penggambaran blok tebangan dan pemanfaatan<br>• Ketidaksesuaian di Register 46 adalah di peta RKT 2022 sudah tidak ada penggambaran blok tebangan, dan blok pemanfaatan dan peta RKT 2023 tidak ada penggambaran blok pemanfaatan<br>• Ketidaksesuaian di Register 42 adalah di peta RKT 2022 dan 2023 sudah tidak ada penggambaran blok tebangan dan pemanfaatan, dan persemaian<br>• Ketidaksesuaian di Register 44 adalah di peta RKT 2022 sudah tidak ada penggambaran blok tebangan dan di RKT 2023 tidak ada penggambaran blok pemanfaatan. |
| 3. | Verifier 2.5.3 | : | Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ *bufferzone*/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan) |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung telah melakukan penandaan sebagian batas blok RKT 2023 dan 2022. Sebagai berikut :<br>• Tanda batas blok RKT 2023 terlihat pada Register 46 ,44 dan 42 berupa plang RKT 2023 berupa tanaman sengon dan karet terlihat jelas di lapangan.<br>• Tanda batas petak berupa patok yang terbuat dari kayu dengan cat warna merah dan tulisan putih , sebagian terlihat jelas di lapangan. Beberapa batas petak identitasnya tidak lengkap seperti identitas pada patok batas petak RKT 2023 register 46 petak 60,59,64, 65 dan ada beberapa patok batas petak tidak ditemukan di lapangan seperti tanda petak 86 dan 64 Regsiter 46. Hal ini disebabkan karena adanya konflik tenurial dengan masyarakat.<br>Implementasi peta kerja berupa areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung diantaranya penandaan kawasan lindung KPPN,DPSL dan sempadan Sungai tetapi belum seluruhnya terealisasi dan telah mencapai 83,31%. |
| 4. | Verifier 2.5.4 | : | Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | • Realisasi volume komuditas kayu bulat, getah karet, tebu dan singkong tahun 2021 kurang dari 70% dari rencana tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan. Realisasi produksi tahun 2021 sebesar 45,05%. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | • Realisasi volume komuditas getah karet, tebu dan singkong tahun 2022 kurang dari 70% dari rencana tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan. Realisasi produksi tahun 2022 sebesar 63,98%. |
| Nilai Kinerja Indikator 2.5 | | : | **SEDANG** dengan Nilai mencapai 71,42 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

10. Indikator 2.6 :
Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 2.6.1 | : | Kondisi kesehatan finansial |
| | Bobot | : | CD |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Laporan Auditor Independen Kepada Para Pemegang Saham PT Inhutani V, dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, yang dibuat oleh Purwanto, Sungkoro & Surja (surat Izin Akuntan Publik No. AP.1609), tanggal 24 Juni 2022 dengan Opini Laporan Keuangan Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan hasil analisis Laporan Audit Keuangan dengan parameter Rentabilitas -0,41% (negatif), Likuiditas 965,14% (>150%) dan Solvabilitas 216,84% (>150%) |
| 2. | Verifier 2.6.2 | : | Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). |
| | Bobot | : | CD |
| | Nilai | : | Buruk |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Realisasi alokasi dana sebesar 52 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya. Dimana Rencana Sebesar Rp.3.054.392.000 dan realisasi sebesar Rp. 1.584.349.202. |
| 3. | Verifier 2.6.3 | : | Realisasi alokasi dana yang proporsional |
| | Bobot | : | CD |
| | Nilai | : | Buruk |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari >50%) yaitu 88%, dimana realisasi dana terbesar pada perencanaan 109% dan terendah pada kegiatan pengamanan 52%.. |
| 4. | Verifier 2.6.4 | : | Realisasi pendanaan yang lancar |
| | Bobot | : | CD |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tidak sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan dikarenakan permasalah Tenurial sehingga banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan tata waktunya, namun terdapat upaya perusahaan untuk melakukan Pola Kemitraan dengan Kelompok Tani Hutan seluas 17.394,27 Ha. |
| 5. | Verifier 2.6.5 | : | Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ringkasan Justifikasi | : | Realisasi penanaman tanaman budidaya sampai dengan bulan Januari 2023 dengan terjalinnya pola kemitraan dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) terealisasi sebesar 29.268,42 Ha atau realisasi penanaman tanaman budidaya sebesar 59 %, atau kurang dari 80%. Dengan masih terdapatnya kasus Tenurial pada areal peruntukan Tanaman Pokok, sehingga Tata Ruang yang telah direncanakan tidak sesuai lagi dengan kondisi lapangan, maka perusahaan akan merevisi RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027 |
| 6. | Verifier 2.6.6 | : | Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan |
| | Bobot | : | CD |
| | Nilai | : | Buruk |
| | Ringkasan Justifikasi | : | • Realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan PBPH HP PT Inhutani V Unit Lampung tahun 2021 < 50% dari yang seharusnya (RKT) dengan rata rata sebesar 11,48%, dimana rencana seluas 2.675 Ha dan teralisasi seluas 307,11 Ha.<br>• Realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan PBPH HP PT Inhutani V Unit Lampung tahun 2022 < 50% dari yang seharusnya (RKT) dengan rata rata sebesar 12,79%, dimana rencana seluas 16.559 Ha dan teralisasi seluas 2.118,33 Ha |
| Nilai Kinerja Indikator 2.6 | | : | **BURUK** dengan Nilai mencapai 52,38 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

## C. KRITERIA EKOLOGI

11. Indikator 3.1 :
Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 3.1.1 | : | Luasan kawasan dilindungi |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Kondisi biofisik kawasan lindung ada yang tidak sesuai yaitu di sebagian KPPN, Kawasan Lindung setempat /DPSL, dan sebagian sepadan sungai karena terjadinya perubahan struktur vegetasi dan ekosistem berupa kebun singkong dan karet milik masyarakat.<br>Kawasan Lindung berdasarkan RKUPHHK-HTI PT PT INHUTANI V Unit Lampung Periode 2018 – 2027 (SK MenLHK No. SK.5045/MenLHK-PHPL/UHP/ PHPL.I/2018) tanggal 2 Agustus 2018 **sebagian tidak sesuai** dengan ANDAL tahun 1995 yang disetujui Komisi Pusat AMDAL Dephut Nomor: 158/DJ- VI/ AMDAL/95 tanggal 24 Juli 1995 dan sebagian juga tidak sesuai dengan kondisi biofisik tegakan / vegetasi di lapangan. |
| 2. | Verifier 3.1.2 | : | Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | - Berita Acara Penandaan Kawasan Lindung No. 122/IHT-V/Lmp/Reg44/BA/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022<br>- Berita Acara Penandaan Kawasan Lindung No. 26/IHT-V/Lmp/Reg46/BA/02/2022 Tanggal 6 Februari 2022<br>- Wawancara dengan M. Fadilah Latif (Asisten Manager Reg. 44- TBB)<br>- RKUPHHK-HTI PT PT INHUTANI V Unit Lampung Periode 2018 – 2027 (SK MenLHK No. SK.5045/MenLHK-PHPL/UHP/ PHPL.I/2018) tanggal 2 Agustus 2018.<br>PT Inhutani V Unit Lampung merencanakan penandaan batas kawasan dilindungi adalah sepanjang 898.248,5 m dan baru terealisasi hingga Februari 2023 yaitu : 748.281,55 m **(83,31** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **%)**. Penandaan batas kawasan dilindungi sesuai verifikasi lapangan adalah dengan menggunakan cat warna kuning pada tegakan setinggi DBH. Hal ini telah sesuai dengan SOP Pengelolaan Kawasan Lindung No. 02/SOP-IHT5/2013, Tanggal Berlaku : Tahun 2013. |
| 3. | Verifier 3.1.3 | : | Kondisi penutupan kawasan dilindungi |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan hasil perbandingan antara areal kawasan lindung yang ada dalam Peta RKUPHHK-HTI PT PT INHUTANI V Unit Lampung Periode 2018 – 2027 (SK MenLHK No. SK.5045/MenLHK-PHPL/UHP/ PHPL.I/2018) tanggal 2 Agustus 2018 dengan Peta Penutupan Lahan hasil penafsiran komposit citra satelit No. S.258/IPSDH/PSDH/ PLA.1/3/2022 perihal Hasil Pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Satelit Areal PBPHHP, Tanggal 28 Maret 2022, maka diperoleh luas Kawasan Lindung yang masih berhutan seluas ± 3.931,14 Ha (± 62,15 %) dari total luasan kawasan lindung seluas ± 6.325,71 Ha. Kegiatan menghutankan kembali (pengayaan) kawasan lindung baru terealisasi 0,2 ha. |
| 4. | Verifier 3.1.4 | : | Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable) |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | *Not Applicable* |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Areal PBPH PT Inhutani V Unit Lampung tidak memiliki jenis kawasan lindung berupa areal ekosistem gambut, sehingga tidak terdapat pengelolaan gambut dan verifier ini tidak dapat diterapkan. |
| 5. | Verifier 3.1.5 | : | Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi |
| | Bobot | : | CD |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Sosialisasi Kawasan Lindung kepada Masyarakat yang sudah dilaksanakan antara lain ke desa binaan PT INHUTANI V Unit Lampung dimana sudah dilakukan sosialisasi ke 5 (lima) desa binaan yaitu ke Reg. 44 Desa Jaya Murni tanggal 9 Mei 2022, Desa Margo Dadi tanggal 10 Mei 2022, Desa Mekar Jaya, Desa Gunung Agung tanggal 11 Mei 2022, Tulang Bawang Barat, Reg 42 Desa Karya Agung tanggal 9 Februari, dan Reg. 44 Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan. |
| 6. | Verifier 3.1.6 | : | Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT INHUTANI V Unit Lampung sudah memasang plang Papan Kawasan Lindung di Regester 44, Regester 46 Tulang Bawang Barat dan Way Kanan.<br>PT INHUTANI V Unit Lampung **sudah** membuat dan mengirimkan Laporan RKL/RPL Semester II Tahun 2021 dan Laporan RKL dan RPL smester I Tahun 2022 kepada Kepala BLHD Provinsi Lampung, sesuai surat nomor : 13/IHT-V/Lmp/01/2022 23 Januari 2022 perihal : Laporan RKL/RPL PT Inhutani V dan surat nomor : 173/IHT-V/Lmp/07/2022, tanggal 25 Juli 2022, perihal : Laporan RKL/RPL PT Inhutani V beserta bukti pengiriman laporan tersebut.<br>PT Inhutani V Unit Lampung **belum** membuat dan mengirim Laporan RKL/RPL dan Semester II Tahun 2022 ke Instansi terkait. |
| Nilai Kinerja Indikator 3.1 | | : | **SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

12. Indikator 3.2 :
Perlindungan dan pengamanan hutan

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 3.2.1 | : | Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Sampai dilakukannya audit penilikan ke-3 saat ini bulan Maret 2023, terdapat Revisi dan/ atau SOP tambahan terkait perlindungan hutan, yaitu : SOP Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Huan, No 148a/INH-V/SOOP/2/2023 Tgl 8 Februari 2023. Dalam SOP sudah mencantumkan referensi peraturan perundangan yang terbaru sebagai acuan dalam penyusunan SOP (PermenLHK Nomor : P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016).<br>SOP Perlindungan Flora dan Fauna (No.03/SOP- IHT5/2013t) **Belum mengacu** ke PermenLHK No. P.106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas P.20/MenLHK/Setjen/ Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. |
| 2. | Verifier 3.2.2 | : | Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan Daftar peralatan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan PT INHUTANI V Unit Lampung maka sarana Damkarhutla PT INHUTANI V Unit Lampung belum sepenuhnya mengacu Peraturan Menteri LHK Nomor : P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan & Lahan |
| 3. | Verifier 3.2.3 | : | SDM perlindungan hutan |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Semua personil Satpam/wakar maupun personil Dalkarhutla PT INHUTANI V Unit Lampung belum ada yang memiliki sertifikat pelatihan damkar dan/atau sertifikat pelatihan satpam.<br>PT Inhutani V Unit Lampung belum memiliki kerjasama dengan desa-desa binaannya untuk menjadi MPA dari seluruh desa yang ada sejumlah 38 desa. Sehingga belum ada Masyarakat binaan di desa yang menjadi binaan PT Inhutani V Unit Lampung yang kemudian direkrut untuk menjadi MPA (Masyarakat Peduli Api) |
| 4. | Verifier 3.2.4 | : | Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung :<br>- Telah menyediakan personil perlindungan hutan yakni personil damkar dan personil satpam/wakar<br>- Terdapat plang tanda/informasi memasuki areal PT Inhutani V Unit Lampung<br>- Terdapat plang informasi/ himbauan/ larangan terkait perlindungan hutan (ancaman kebakaran, perlindungan flora dan fauna)<br>- Belum membentuk MPA<br>- PT Inhutani V Unit Lampung telah mengimplementasikan perlindungan gangguan hutan tetapi belum mencakup seluruh gangguan yang ada. |
| Nilai Kinerja Indikator 3.2 | | : | **SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

13. Indikator 3.3 :
Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 3.3.1 | : | Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) PT Inhutani V Unit Lampung Tahun 1995, kegiatan pemanfaatan hutan akan berdampak pada tanah dan air berupa perubahan sifat fisik kimia air dan tanah, hidrologi, dan kualitas air. Dampak negatif penting yang potensial timbul terhadap komponen fisik kimia adalah peningkatan laju erosi, peningkatan aliran permukaan, peningkatan debit air sungai, sedimentasi, dan kekeruhan.<br>Selama periode 1,5 tahun terakhir **Tidak ada** penambahan Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air yang dimiliki PT Inhutani V Unit Lampung. Jika mengacu pada jenis-jenis dampak yang akan terjadi sesuai AMDAL Tahun 1995, maka prosedur yang belum tersedia adalah SOP terkait pemantauan kualitas air, SOP pemantauan sifat fisik dan kimia tanah, dan SOP Pemantauan Erosi dan Aliran permukaan. |
| 2. | Verifier 3.3.2 | : | Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Sarana prasarana penunjang yang masih **belum** tersedia dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air sesuai dengan rencana pengelolaan dan pemantauan yang disusun PT Inhutani V Unit Lampung, antara lain seperti : alat pengukur erosi (bak erosi/stik erosi), TPA sampah, bangunan konservasi tanah dan air (guludan, sodetan, sediment trap), dan alat ukur tinggi muka air sungai. |
| 3. | Verifier 3.3.3 | : | SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Baik |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan data dari BPHL Wilayah VI Bandar Lampung dan PT Inhutani V Unit Lampung, bahwa PT Inhutani V Unit Lampung telah memiliki 1 (satu) orang Ganis-PHPL Binhut yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan, yaitu Bapak Musiani, No. Register 00072-06/BINHUT/X/2020, dengan masa berlaku regester dan penugasan sampai tanggal 25 Juni 2023 serta No. Regester Kompetensi 024029 3143 0001927 2022, |
| 4. | Verifier 3.3.4 | : | Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan verifikasi di lapangan, PT Inhutani V Unit Lampung telah membuat persemaian di Register 46 (104°46' 31,627" E dan 4°32' 59,503"S), dengan Stok Bibit sebanyak 115.301 btg terdiri dari Sengon 7.701 btg, Akasia 59.446 btg, Karet 158 btg, Indigofera : 33.258 btg, Eucalyptus : 14.738 btg.<br>Tempat sampah belum dibedakan antara sampah organik dan sampah anorganik<br>Gudang genset telah diperkeras dengan lantai semen namun belum dilengkapi dengan sistem oiltrap.<br>Dalam pengelolaan limbah B3, PT Inhutani V Lampung belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) LB3 dan izin pendiriannya. PT Inhutani V Unit Lampung juga belum bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan limbah B3. |
| 5. | Verifier 3.3.5 | : | Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak tanah dan air dan mengimplementasikan sebagian kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan rencana. Kegiatan pemantauan dampak tanah dan air yang belum dilakukan yakni belum melakukan pemantauan erosi sungai, sedimentasi sungai, dan pemantauan kesuburan tanah (sifat fisik-kimia tanah). |
| 6. | Verifier 3.3.6 | : | Dampak terhadap tanah dan air |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Dampak terhadap kualitas tanah (sifat fisik kimia tanah, kesuburan tanah, erosi tanah) dan kualitas air (kualitas air sungai, sedimentasi sungai, debit air sungai) belum dapat diketahui, karena PT Inhutani V Unit Lampung belum melakukan kegiatan pemantauannya.<br>Indikasi adanya dampak terhadap tanah dapat dilihat melalui teknis pengelolaan limbah, baik limbah domestik maupun limbah B3. Hal tersebut disebabkan karena limbah merupakan faktor yang secara langsung menjadi penyebab adanya dampak negatif terhadap tanah dan air. Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan |
| Nilai Kinerja Indikator 3.3 | | : | **SEDANG** dengan nilai mencapai 72,22%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

14. Indikator 3.4 :
Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 3.4.1 | : | Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode penilikan terdapat penambahan Prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang dimiliki PT Inhutani V Unit Lampung, yaitu : SOP Identifikasi Flora dan Pengelolaan Biodiversity No.153.d/IHT-V/SOP/2/2023 Tanggal 8 Februari 2023.<br>Dalam SOP identifikasi flora dan fauna **belum** mengkategorikan/ status flora dan faunan Jarang, Langka, Terancam Punah, Endemik, dan Dilindungi.<br>SOP ini **belum** mengacu secara eksplisit terhadap PP 7/1999, IUCN redlist, dan Appendix CITES. |
| 2. | Verifier 3.4.2 | : | Implementasi kegiatan identifikasi |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung sudah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna pada Kawasan lindung setempat / DPSL di Regester 44 dan Regester 46, sesuai Berita Acara yang ada, namun **belum** ada Laporan Identifikasi Flora dan Fauna dari kegitan tersebut, Lokasi jenis Kawasan Lindung **tidak** disebutkan dalam Berita Acara Identifikasi Flora dan Fauna, dan Berita Acara Identifikasi Flora dan Fauna di Reg. 46 **tidak** dilampiri dokumentasi foto-foto. |
| Nilai Kinerja Indikator 3.4 | | : | **SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

15. Indikator 3.5 :
    Pengelolaan flora untuk :
    1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
    2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 3.5.1 | : | Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Baik |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode penilikan terdapat 1 (satu) penambahan Prosedur pengelolaan flora dilindungi yang dimiliki PT Inhutani V Unit Lampung, yaitu : SOP Identifikasi Flora dan Pengelolaan Biodiversity No.153.d/IHT-V/SOP/2/2023 Tgl 8 Februari 2023. PT Inhutani V Unit Lampung telah memiliki prosedur pengelolaan flora untuk jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. SOP sudah mengacu dan mencantumkan rujukan yang terbaru yakni PermenLHK P.106 tahun 2018) tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK No. P.20/MenLHK/Setjen/ Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindung. SOP Identifikasi dan Pengelolaan Biodiversity No.153.d/IHT-V/SOP/2/2023 memuat strategi pengelolaan flora seperti : sosialisasi kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, memberi plang pada areal habitat flora dilindungi, setiap pohon yang menjadi pohon pakan atau dilindungi tidak boleh ditebang untuk kepentingan satwa, dan pengelolaan terhadap habitat flora dengan kegiatan penanaman, pemeliharaan, pembuatan kebun benih, budidaya flora yang keberadaannya mulai berkurang di persemaian, serta eradikasi tumbuhan yang menjadi hama, invasif dan bersifat eksotik. |
| 2. | Verifier 3.5.2 | : | Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode penilikan PT Inhutani V Unit Lampung telah melakukan **sebagian** kegiatan pengelolaan flora dilindungi sesuai dengan prosedur dan/atau rencana yang disusun, diantaranya :<br>1. PT IHT V Lampung telah melakukan identifikasi flora dilindungi, namun hasil identifikasi belum diklasifikasikan sesuai kategori dilindungi PermenLHK P.106/2018. Identifikasi flora baru dilakukan di Register 44, dan Regester 46 belum seluruhnya pada kawasan lindung masing-masing register.<br>2. Pada areal yang terdapat pohon-pohon langka yang dilindungi dan pohon yang mempunyai manfaat penting bagi kehidupan masyarakat tetap dijaga keberadaannya dan kelestariannya namun belum dilakukan secara optimal. Habitat kawasan lindung PT IHT V Lampung mayoritas sudah tidak dapat menunjang jenis flora dilindungi akibat pembukaan areal/okupasi lahan. Di KPPN tertanam ± 20 ha jenis tanaman endemik<br>3. Pengalokasian kawasan lindung sesuai Dokumen RKUPHHK-HTI PT INHUTANI V Tahun 2018 (Periode 2018 –2027). Kawasan lindung dikukuhkan sesuai SK Direksi PT INHUTANI V No. 35/IHT-V/Kpts/2023 Tanggal 3 Februari 2023.<br>4. Membuat persemaian di Regester 46 pada koordinat 104°46' 31,627" E dan 4°32' 59,503" S, dengan jenis tanaman yaitu / stock bibit : Sengon : 7.701 bbt, Akasia : 59.446 bbt, Karet : 158 bbt, Indigofera : 33.258 bbt, Eucalyptus : 14.738. Total : 115.30 bbt.<br>5. Kegiatan menghutankan kembali (pengayaan) kawasan lindung terealisasi 0,2 ha, dengan jenis tanaman sengon 200 batang dan eucalyptus 200 batang jarak tanam 5 x 4 m<br>6. Inhutani V Unit Lampung juga telah melakukan rehabilitasi kawasan lindung berupa Sengon 100 batang (0,05 Ha) jarak tanam 5x4 m; dan Eucalyptus 100 batang (0,05 Ha) jarak tanam |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 5x4 m. Kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pengayaan Kawasan Lindung Setempat (DPSL) Regester 46, No 15/IHT-Lmp/Reg.46/BA/03/022 tanggal 19 Maret 2022. |
| 3. | Verifier 3.5.3 | : | Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Areal PT Inhutani V Lampung sebagian besar telah dirambah oleh masyarakat, termasuk pada kawasan lindung. Berdasarkan data perkembangan penguasaan lahan per Bulan Maret 2023, masih terdapat konflik lahan sebesar 26.886,81 Ha (47,55%) dan terdapat tambang batu (galian C) sebesar 45Ha (0,08%). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat aktivitas yang berpotensi mengganggu keberadaan jenis-jenis flora dilindungi pada areal PT Inhutani V Lampung. Berdasarkan pengamatan secara faktual di lapangan, areal kerja pada dasarnya sudah tidak dapat mendukung habitat jenis flora dilindungi karena sebagian besar kawasan telah dikonversi menjadi hutan tanaman dan tanaman-tanaman lain berupa tebu dan singkong. Meskipun begitu, PT Inhutani V Unit Lampung telah melakukan upaya-upaya dalam mempertahankan flora dilindungi, yakni melalui patroli areal; pemasangan signboard perlindungan hutan; penanaman di kawasan lindung; deteksi dini karhutla melalui pemantauan hotspot, dan sebagainya. |
| Nilai Kinerja Indikator 3.5 | | : | **SEDANG** dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

16. Indikator 3.6 :
    Pengelolaan fauna untuk :
    1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
    2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 3.6.1 | : | Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Baik |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode penilikan, terdapat tambahan 1 (satu) SOP terkait pengelolaan fauna dilindungi, yakni SOP Identifikasi dan Pengelolaan Biodiversity No.153.d/IHT-V/SOP/2/2023 Tanggal 8 Februari 2023.<br>SOP Identifikasi dan Pengelolaan Biodiversity No.153.d/IHT-V/SOP/2/2023 sudah memuat strategi pengelolaan fauna. Bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan fauna dilindungi juga sudah secara spesifik terhadap jenis fauna dilindungi hasil identifikasi. Kegiatan pengelolaan dalam prosedur sudah menckup pengelolaan dan perlindungan kawasan lindung sebagai habitat dan daya dukung satwa fauna yang dilindungi, sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat terkait fauna yang dilindungi, dan pembinaan terhadap wilayah-wilayah yang berfungsi sebagai tempat keterediaan pakan satwa. |
| 2. | Verifier 3.6.2 | : | Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode penilikan PT Inhutani V Unit Lampung telah melakukan **sebagian** kegiatan pengelolaan flora dilindungi sesuai dengan prosedur dan/atau rencana yang disusun, diantaranya :<br>1. Kegiatan pengamatan/ Inventarisasi fauna/satwa liar telah dilakukan namun belum ada laporan inventarisasi satwa untuk menentukan tingkat penyebaran dan indeks keanekaragaman |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2. Melakukan Pengayaan kawasan lindung dengan jennis Sengon 100 batang (0,05 Ha) jarak tanam 5x4 m; dan Eucalyptus 100 batang (0,05 Ha) jarak tanam 5x4 m, sesuai Berita Acara Pengayaan Kawasan Lindung Setempat (DPSL) Regester 46, No 15/IHT-Lmp/Reg.46/BA/03/022 tanggal 19 Maret 2022.<br>3. Mengalokasikan sebagian kawasan konsesi sebagai kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN) atau sebagai kawasan perlindungan setempat seperti daerah yang terjal, sempadan sungai, rawa-rawa, dan daerah perlindungan satwa liar (DPSL)<br>Melakukan sosialisasi ke 5 (lima) desa binaan yaitu ke Reg. 44 Desa Jaya Murni tanggal 9 Mei 2022, Desa Margo Dadi tanggal 10 Mei 2022, Desa Mekar Jaya, Desa Gunung Agung tanggal 11 Mei 2022, Tulang Bawang Barat, Reg 42 Desa Karya Agung tanggal 9 Februari, dan Reg. 44 Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan. |
| 3. | Verifier 3.6.3 | : | Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik |
| | Bobot | : | D |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil wawancara yang dilakukan Auditor Sosial dengan masyarakat, yakni Bpk Pansebon (Ketua Kelompok Berkah Tani) dan Bpk Rajimun di Regester 42 desa Bandar Dalem masyarakat masih melakukan perburuan satwa dari jenis burung Cucak Hijau dan Perkutut. Berdasarkan PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, jenis burung Cucak Hijau (*Chloropsis sonnerati*) dan burung perkutut (Geopelia striata) adalah dilindungi. Hal ini mengindikasikan masih terganggunya jenis fauna dilindungi khususnya dari Kelas Aves/Burung.<br>Upaya yang dilakukan PT Inhutani V Unit Lampung dalam meminimalisir kegiatan perburuan ini, antara lain :<br>• Patroli areal kerja setiap hari (jika cuaca memungkinkan/tidak hujan).<br>Penempatan pos security dan anggota TNI untuk pengamanan areal. |
| Nilai Kinerja Indikator 3.6 | | : | **SEDANG** dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

## D. KRITERIA SOSIAL

**17. Indikator 4.1 :**
**Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 4.1.1 | : | Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat seperti dokumen RKUPHHK-HTI, RKTPH Tahun 2022 dan tahun 2023, Peta sebaran desa masing-masing register, dokumen perjanjian kemitraan dengan masyarakat, namun Rencana Operasional Kelola Sosial tahun 2022 dan tahun 2023 belum tersedia untuk masing-masing register, tidak tersedia dan data pemanfaatan HHBK oleh masyarakat dan tidak tersedia dokumen monografi desa atau profil desa untuk seluruh desa binaan. |
| 2. | Verifier 4.1.2 | : | Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung memiliki mekanisme batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak seperti SOP Pembuatan Batas Partisipatif (No.82.v/IHT-V/SOP/2/2019) dan SOP Resolusi Konflik (No.148.e/IHT-V/SOP/2/23). Untuk SOP Resolusi Konflik belum mengacu pada P.8 Tahun 2021 Lampiran V tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi. Belum menjelasakan mengenai pelaporan dan perhitungan status konflik di dalam areal. |
| 3. | Verifier 4.1.3 | : | Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH seperti SOP Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat No.82.w/IHT-V/SOP/2/2019), SOP Pembuatan Perjanjian dan Kesepakatan dengan Masyarakat (No.82.x/IHT-V/SOP/2/2019), SOP Pelaksanaan Kemitraan PT Inhutani V (No.267/SOP-IHT V/2012).<br>Prosedur tersebut sebagian mengakomodir pengakuan hak-hak masyarakat adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH namun belum tersedia SOP mengenai HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat, sedangkan implemetasinya terdapat masyarakat yang memanfaatkan HHBK. |
| 4. | Verifier 4.1.4 | : | Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | Sedang |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ringkasan Justifikasi | : | Penataan batas PT Inhutani V Unit Lampung telah temu gelang dengan realisasi sepanjang 219.258,16 meter atau 100% dari rencana sepanjang ±220.080,47 meter, sebagaimana tercantum pada dokumen laporan hasil pelaksanaan penataan batas No LAP2/BPKHXX/PKH.3.2/2021 dengan rincian sebagai berikut :<br>- Register 18 sepanjang 15,010,33 m<br>- Register 42 sepanjang 52.221,66 m<br>- Register 44 sepanjang 103.490,66 m<br>- Register 46 sepanjang 48.535,51 m<br><br>Berdasarkan dokumen Amdal tahun 1995, pada areal PT Inhutani V Unit Lampung tidak terdapat wilayah adat dari desa sekitar dan tidak terdapat tempat-tempat penting yang dilindungi oleh masyarakat sekitar, akan tetapi saat ini pada areal PT Inhutani V Unit Lampung banyak dikuasai oleh masyarakat berupa pemukiman penduduk (reg 18), Sekolah Dasar, PAUD, Gereja, Pure, Masjid, pasar (reg 44), Kebun Karet, Kebun Singkong, Kebun Tebu dan alpukat (Reg 18, 42, 44 dan 46) milik masyarakat, namun baru sebagian yang telah dilakukan identifikasi dan pengukuran di lapangan dan dilakukan kemitraan. |
| 5. | Verifier 4.1.5 | : | Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Penataan Batas areal PT Inhutani V Unit Lampung sudah temu gelang namun masih terdapat konflik lahan dengan masyarakat seluas 26.931,81 Ha sebesar 47,71 % dari luasan total 56.547 Ha. Kegiatan operasional PT Inhutani V Unit Lampung telah mendapatkan sebagian dukungan atau persetujuan oleh para pihak dan masih terdapat potensi konflik terkait banyaknya klaim lahan oleh masyarakat sekitar dan baru sebagian yang diselesaikan melalui program kerjasama kemitraan. |
| Nilai Kinerja Indikator 4.1 | | : | SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

**18. Indikator 4.2 :**
**Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 4.2.1 | : | Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung memiliki sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku seperti dokumen RKUPHHK-HTI, RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023, Peta sebaran desa masing-masing register, dokumen perjanjian kemitraan dengan masyarakat, namun Rencana Operasional Kelola Sosial tahun 2022 dan tahun 2023 belum tersedia untuk masing-masing register. |
| 2. | Verifier 4.2.2 | : | Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat seperti SOP Pelaksanaan Kemitraan PT Inhutani V (No.267/SOP-IHT V/2012), SOP Pembuatan Perjanjian dan Kesepakatan dengan Masyarakat (No.82.x/IHT-V/SOP/2/2019), SOP Pemenuhan Tanggung Jawab Sosial (CSR) (No 148.H/IHT-V/SOP/02/2023), SOP Kerja Kelola Sosial PMDH (No 153.C/IHT-V/SOP/02/2023). PT Inhutani V Unit Lampung memiliki mekanisme yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | namun kurang lengkap seperti belum tersedia SOP HHBK dimana kegiatan HHBK merupakan salah satu pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. |
| 3. | Verifier 4.2.3 | : | Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung telah melakukan sosialisasi tahun 2022 untuk semua register namun kegiatan sosialisasi belum menjangkau sebagian besar masyarakat dan belum seluruh desa. Sosialisasi yang disampaikan mengenai RKT, visi misi, KARHUTLA, dan Kelola Sosial. |
| 4. | Verifier 4.2.4 | : | Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung memiliki rencana kelola sosial tahun 2022 dan tahun 2023 yang tertuang dalam dokumen RKTPH tahun 2022 dan tahun 2023. Berdasarkan dokumen tersebut kegiatan kelola sosial yang direncanakan belum terealisasi namun terdapat kegiatan bantuan pemberian sembako dan pemberian bibit kepada masyarakat dan kemitraan yang dilakukan oleh Perusahaan. Sehingga PT Inhutani V Unit Lampung memiliki sebagian bukti terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat yang berada di sekitar areal. |
| 5. | Verifier 4.2.5 | : | Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung memiliki sebagian laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi tertuang dalam dokumen RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023, tersedia pembayaran bagi hasil kepada masyarakat sesuai dengan kesepakatan seperti berita acara produksi (243/IHT-V/Lmp/Reg.42/BA/10/2022 sejumlah Rp 4.550.000 kepada 31 penggarap, Realisasi kelola sosial pada tahun 2022 belum teralisasi sesuai data dalam RKTPH Tahun 2023. namun Rencana Operasional Kelola Sosial tahun 2022 dan tahun 2023 belum tersedia untuk masing-masing register, tidak tersedia dan data pemanfaatan HHBK oleh masyarakat dan tidak tersedia dokumen monografi desa atau profil desa untuk seluruh desa binaan. |
| Nilai Kinerja Indikator 4.2 | | : | SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

**19. Indikator 4.3 :**
**Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak**.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 4.3.1 | : | Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung memiliki sebagian data dan informasi yang tersedia mengenai masyarakat hukum adat/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan berdasarkan penelusuran dokumen RKTPH Tahun 2022 dan tahun 2023, Peta sebaran desa masing-masing register, data Karyawan lokal, kontraktor lokal, data masyarakat yang bermitra, namun tidak tersedia data pemanfaatan HHBK |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | oleh masyarakat dan tidak tersedia dokumen monografi desa atau profil desa untuk seluruh desa binaan. |
| 2. | Verifier 4.3.2 | : | Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat SOP Peningkatan Ekonomi Masyarakat (No.82.y/IHT-V/SOP/2/2019), SOP Pelaksanaan Kemitraan PT Inhutani V (No.267/SOP-IHT V/2012), SOP Kelola Sosial PMDH (153.c/IHT-V/SOP/02/2023), SOP Pemenuhan Tanggung Jawab Sosial (CSR) (148.h/IHT-V/SOP/02/2023) dan lainnya. Hasil telaahan terhadap SOP tersebut, berisi tentang uraian tentang tujuan, ruang lingkup, penanggung jawab, acuan yang dipakai, pengertian, prosedur tahapan kegiatan serta dokumentasi hasil kegiatan, namun belum tersedia SOP yang mengatur mengenai HHBK. |
| 3. | Verifier 4.3.3 | : | Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung memiliki sebagian dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, namun tidak lengkap dan tidak sinkron antara rencana jangka panjang yang ada dalam RKUPHHK-HTI dengan rencana jangka pendek yang ada dalam RKTUPHHK-HTI, serta tidak memiliki rencana operasional kelola sosial yang merupakan uraian detail program kelola sosial yang akan dilaksanakan pada masing-masing desa binaan |
| 4. | Verifier 4.3.4 | : | Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung telah melakukan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk penyerapan tenaga kerja lokal dan realisasi kegiatan kelola sosial pada bidang ekonomi, dengan hasil sebagai berikut.<br>• Realisasi Kelola Sosial/CSR PT Inhutani V Unit Lampung Tahun 2022 sebesar 0 **%.**<br>• Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Tahun 2023 per 6 Maret, sebesar 36,95 **%**<br>• Realisasi Kemitraan dengan Masyarakat (Maret 2023), sebesar 52,37 %<br>• Pemanfaatan kontraktor dari lokal (pengelolaan KTH), sebesar 100 **%**<br>Nilai Pendekatan terhadap Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT Inhutani V Unit Lampung sebesar :<br>(0 + 36,95 + 52,37 + 100 ) % : 4 = **47,33 % ( < 50 %)**<br>PT Inhutani V Unit Lampung memiliki bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat sebesar **47,33 % ( < 50 %)** |
| 5. | Verifier 4.3.5 | : | Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | Sedang |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung memiliki sebagian bukti dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak seperti kepada masyarakat seperti kemitraan dan penyuluhan, distribusi kepada karyawan berupa daftar karyawan, pembayaran gaji karyawan tepat waktu dan sesuai UMK. Untuk distribusi kepada negara berupa pembayaran PBB tahun 2021, PPH 21, untuk tahun 2022 telah dibayarkan melalui bank Mandiri, begitupun untuk pembayaran PSDH Kayu dan HHBK, BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan tahun 2023 telah dibayarkan. |
| Nilai Kinerja Indikator 4.3 | | : | SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

**Indikator 4.4 :**

**Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 4.4.1 | : | Tersedianya mekanisme resolusi konflik |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung memiliki mekanisme resolusi konflik seperti Resolusi Konflik (No.148.e/IHT-V/SOP/2/23). Hasil telaahan terhadap isi SOP Resolusi Konflik tersebut berisi uraian tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, acuan, pengertian, prosedur dan dokumentasi, namun belum mengacu pada P.8 Tahun 2021 Lampiran V tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi. Belum menjelasakan mengenai pelaporan dan perhitungan status konflik di dalam areal. |
| 2. | Verifier 4.4.2 | : | Tersedia peta konflik |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung memiliki pemetaan resolusi konflik yang tertuang dalam peta konflik yang dimiliki setiap register. Progres kegiatan kemitraan PT Inhutani V Unit Lampung sampai Maret 2023 telah dapat menyelesaikan konflik seluas 29.615.19 Ha atau sebesar 52,37 % dan masih punya kewajiban penyelesaian konflik sekitar 26.931,81 Ha sebesar 47,71 % dari seluruh luas areal kerja. PT Inhutani V Unit Lampung, terlihat telah ada upaya dari manajemen PT Inhutani V Unit Lampung untuk terus melakukan penyelesaian konflik. Namun perusahaan belum memiliki dokumen laporan resolusi konflik sesuai dengan P8 tahun 2021 Lampiran V. |
| 3. | Verifier 4.4.3 | : | Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | Baik |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung memiliki struktur Organisasi Penyelesaian Konflik sesuai dengan Surat Tugas No 53/IHT-V/Lmp/02/2023 tanggal 23 Februari 2023. Pada dokumen ini menjelaskan tim yang bertanggung jawab dalam kegiatan penguarain konflik dari pembina hingga pelakasana. PT Inhutani V Unit Lampung juga melibatkan pihak eksternal yang merupakan lembaga pendukung seperti forum komunikasi, forum kecamatan & desa serta mitra, selain itu perusahaan telah menyusun anggaran Resolusi Konflik Tahun 2022 & 2023 tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), berupa kegiatan penyuluhan dan atau sosialisasi kemitraan. |
| 4. | Verifier 4.4.4 | : | Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | Sedang |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani memiliki sebagian dokumen penyelesaian konflik dengan masyarakat dimana total areal yang dapat diselesaikan sudah mencapai 52,37% atau seluas 29.615,19 Ha dari 56.547 Ha. Dokumen penyelesaian yang dimiliki berupa Nota Kesepakatan Kerjasam/ Surat Perjanjian Kerjasama dengan Kelompok Tani Hutan selian itu tersedia dokumen kronologis terkait penembakan anggota KTH oleh oknum namun belum membuat laporan terkait penyelesaian konflik secara rutin yang mengacu pada P.8 Tahun 2021 Lampiran V, dimana laporan ini dibuat setiap semester dan di laporkan ke instansi terkait. |
| Nilai Kinerja Indikator 4.4 | | : | SEDANG dengan nilai mencapai 75,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

## 20. Indikator 4.5 :
## Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan,Kesejahteraan Tenaga Kerja

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 4.5.1 | : | Adanya hubungan industrial |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | Baik |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung memiliki Perusahaan memiliki PKB dengan nomor 895/IHT-V/PKB/12/2019 dan 05/SKIL/PKB/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 periode 2019 -2021 dan telah disahkan oleh Dirjen PHI dan Jamsostek No. KEP.4/HI.00.01/00.0000.201022002/B/VII/2021 dan untuk PKB tahun 2023 PT Inhutani V Unit Lampung masih dalam proses karena masih dalam pasca merger sehingga tersedia draft PKB tahun 2023-2025 yang di adopsi dari PKB PT Inhutani V, eks PT Inhutani IV dan peraturan perusahaan eks PT PAK. Penjelasan ini tertuang dalam surat no 7/SKIL/03/KTBM/2023 tanggal 01 Maret 2023. Tersedia serikat pekerja yang telah dicatatkan sesuai dengan Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 28 Febuari 2023 (e-0017/KT.03.01) dengan nomor bukti pencatatan 929/SP/JS/II/2023. Hubungan industrial telah diimplementasikan seluruhnya seperti THR, Tunjangan duka, upah karyawan yang telah sesuai dengan UMK dan tidak ada keterlambatan dalam pengupahan, dan tidak ada karyawan yang dibawah umur. |
| 2. | Verifier 4.5.2 | : | Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung telah memiliki rencana pengembangan kompetensi karyawannya yang termuat dalam Rencana dan Realisasi Diklat GANIS PHPLTahun 2022-2023, namun belum seluruhnya teralisasi dan kegiatan rencana training yang direncanakan hanya training mengenai GANIS. |
| 3. | Verifier 4.5.3 | : | Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | Sedang |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung memiliki mekanisme terkait Prosedur Kerja Promosi, Mutasi dan Demosi (PK/SM-IHTV/15/001) tanggal 24 September 202. Pada dokumen ini dijelaskan prosedur jenjang karir namun belum diimplementasikan untuk tahun 2022. |
| 4. | Verifier 4.5.4 | : | Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | Baik |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung telah merealisasikan seluruh tunjangan yang ada seperti pemberian THR, Pengupahan tepat waktu dan telah sesuai UMK, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan sudah dibayarkan setiap bulannya, pemberian APD sesuai kebutuhan dan fasilitas camp sudah cukup memadai seperti tersedia sarana olahraga, mess, kantor dan air bersih |
| Nilai Kinerja Indikator 4.5 | | : | BAIK dengan nilai mencapai 83,33% tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

## E. STANDAR VLK HUTAN

21. Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 1.1.1.a | : | Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK). |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia dokumen SK PBPH PT Inhutani V Unit Lampung yaitu :<br>4. SK Menhut No. 398/Kpts-II/1996 tanggal 13 Juli 1996 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas ± 55.157 (lima puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Kepada PT Inhutani V. SK ditandatangani Menteri Kehutanan atas nama Djamaludin Suryohadikusumo dan dilampiri dengan Peta Skala 1 : 50.000.<br>5. Addendum berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 144/Kpts-II/1999 tanggal 19 Maret 1999 yang mengubah luas dari ± 55.157 Hektar menjadi ± 56.547 Hektar terdiri dari Blok I (Register 44 seluas 32.373 Ha), Blok II (Register 42 seluas 12.729 Ha), Blok III (Register 46 seluas 10.055 Ha), dan Blok IV (Register 18 seluas 1.390 Ha). SK Addendum IUPHHK-HTI dilampiri dengan Peta Skala 1 : 50.000 pada 4 (empat) Blok/ Register.<br>6. Addendum kedua sesuai SK PBPH sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1090/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2021 tanggal 17 November 2021 yang mengubah keputusan sebelumnya beserta lampiran dan peta lampirannya sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, dan hal lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Keputusan ini.<br>Sesuai dengan peta overlapping areal PBPH PT Inhutani V Unit Lampung dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Lampung Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2017 skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.8196/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 dan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Lampung Skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000) diketahui bahwa areal PBPH PT Inhutani V Unit Lampung seluruhnya berada pada kawasan hutan produksi |
| 2. | Verifier 1.1.1.b | : | Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK). |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | 1. PT INHUTANI V Unit Lampung memiliki dokumen SPP IIUPHHK-HTI Nomor: 7197/IV-PHH/95 tanggal 21 November 2009 yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Dapartemen Kehutanan dan telah di tandatangani oleh Ir. T. Sarijanto, M.Sc NIP. 080019197. Berdasarkan SPP IIUPHHK-HTI Nomor: 7197/IV-PHH/95 kewajiban pembayaran IIUPHHK PT INHUTANI V senilai Rp. 71.704.100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2. PT INHUTANI V Unit Lampung memiliki dokumen SPP IIUPHHK-HTI No. 382/V-SET/1998 tanggal 18 Agustus 1998 senilai Rp 3.614.000,-<br>3. PT INHUTANI V Unit Lampung memiliki Bukti Setor IIUPH berupa surat setoran Kepada Bendaharawan Umum Negara Sub Rekening IHPHTI dan IHH nomor rekening 508.000.014. tanggal 08 Desember 1995 sejumlah Rp. 71.704.100,00<br>4. PT INHUTANI V Unit Lampung memiliki Bukti Setor IIUPH berupa surat setoran Kepada Bendaharawan Umum Negara Sub Rekening IHPHTI dan IHH nomor rekening 508.000.014. tanggal 25 Agustus 1998 sejumlah Rp. 3.617.000,00 |
| 3. | Verifier 1.1.1.c | : | Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). |
| | Nilai | : | *Not Applicable (N/A)* |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan telaah terhadap dokumen RKUPH periode 2018-2027, RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 dan Wawancara terhadap MR, dapat diketahui bahwa tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan PBPH PT Inhutani V Unit Lampung. |

22. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 2.1.1.a | : | Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :<br>- Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut.<br>- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval*<br>- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat dokumen RKUPH atau RKUPHHK-HTI PT INHUTANI V jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2018 s/d 2027 telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5045/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.I/2018 tanggal 2 Agustuts 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2018 - 2027 atas nama PT INHUTANI V di Provinsi Lampung dan dilengkapi peta lampiran RKUPHHK-HT Skala 1 : 50.000.<br>PT Inhutani V Unit Lampung telah memiliki dokumen RKTPH yang telah disahkan sebagai berikut :<br>1. RKTPH Tahun 2021 telah disahkan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung No. SK.97/V.24/B.I.2/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan target pemanenan hasil hutan kayu sebagai berikut :<br>- Kayu Akasia di Register 42 seluas 538,67 Ha Volume 45.218,21 m3<br>- Kayu Akasia di Register 46 seluas 169,21 Ha Volume 9.439,69 m3<br>- Kayu Sengon di Register 46 seluas 17 Ha Volume 1.036,48 m3<br>2. RKTPH Tahun 2022 yang telah disusun secara self approval melalui aplikasi SICAKAP dan ditetapkan dan disetujui sesuai dengan keputusan Direktur Utama PT Inhutani V Unit Lampung No. 834/IHT-V/Kpts/2021 tanggal 29 Desember 2021 dengan target pemanenan hasil hutan kayu NIHIL<br>3. RKTPH Tahun 2023 yang telah disusun secara self approval melalui aplikasi SICAKAP dan ditetapkan dan disetujui sesuai dengan keputusan Direktur Utama PT Inhutani V Unit Lampung No. 1404/IHTV/RKT-Lamp/12/2022 tanggal 29 Desember 2022 dengan target pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Sengon seluas 18 Ha Volume 874,37 m3<br>PT Inhutani V Unit Lampung diverifikasi memiliki GANISPH Canhut atas nama : |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 1. Ali Lukmanul Hakim No. Reg. GNS 2063 1983 2022 Sertifikat Kompetensi No. 02404 3143 0001935 2022 LSP BLK<br>2. Roy Satia Nugraha Reg. No. GNS 2063 1971 2022 Sertifikat Kompetensi No. 02404 3143 0001923 2022 LSP BLK |
| 2. | Verifier 2.1.1.b | : | Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan. |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat peta lampiran RKTPH tahun 2022 yang di dalamnya memuat areal yang tidak ditebang berupa:<br>a. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)<br>b. Kawasan Lindung Setempat<br>c. Sempadan Sungai<br>Hasil observasi lapangan dapat dijumpai adanya penandaan pada areal yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai dan anak sungai yang lokasinya sesuai antara koordinat di peta lampiran RKTPH tahun 2022 dengan koordinat sebagai berikut :<br>1) Sempadan Sungai pada Register 46 di blok RKTPH tahun 2022 pada koordinat $04^0$ 30' 45,1" S dan $104^0$ 45' 00,9" E sesuai Peta. Patok sempadan sungai dan penandaan batas dengan kuning terlihat jelas di lapangan<br>2) Sempadan Sungai Kapur di blok RKTPH tahun 2022 Register 46 pada koordinat $04^0$ 32' 29,3" S dan $104^0$ 45' 23,9" E, di lapangan dilakukan penandaan pada lokasi sempadan sungai.<br>3) Kawasan Lindung Setempat (DPSL) di Register 46 pada koordinat $04^0$ 30' 43,5" S dan $104^0$ 45' 01,2" E |
| 3 | Verifier 2.1.1.c | : | Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat Dokumen Berita Acara (BA) Kegiatan Penataan Areal Kerja Blok RKTPH Tahun 2022 dan BAP Penataan Areal Kerja Blok RKT 2023.<br>Terdapat peta lampiran RKTPH tahun 2022 dan RKT Tahun 2023 yang di dalamnya memuat batas blok RKTPH dan Batas Petak.<br>Hasil observasi lapangan pada areal Blok RKTPH tahun 2022 tidak terdapat rencana pemanfaaan kayu dan RKT Tahun 2023 diketahui adanya penandaan batas blok dan petak tebangan serta kesesuain lokasi koordinat antara peta dengan di lapangan sebagai berikut :<br>1. Batas Petak Tebangan Sengon pada Register 46 RKTPH tahun 2023 pada Petak 38 terletak pada koordinat S 04° 32' 23,5" dan E 104° 45' 18,8". Terdapat penandaan dari plang kayu warna biru tulisan warna putih dan terdapat patok cat warna merah dengan tulisan warna putih. Terdapat kesesuaian antara penandaan di peta dan penandaan di lapangan.<br>2. Batas Petak rencana penanaman Sengon pada Register 42 RKTPH tahun 2023 pada Petak 70 dan 69 terletak pada koordinat S 04° 28' 39,7" dan E 104° 32' 41,1". Terdapat penandaan patok cat warna merah dengan tulisan warna putih. Terdapat kesesuaian antara penandaan di peta dan penandaan di lapangan.<br>3. Batas Petak rencana Produksi HHBK Getah Karet pada Register 42 RKTPH tahun 2023 pada Petak 112 dan 113 terletak pada koordinat S 04° 26' 59,2" dan E 104° 32' 41,3". Terdapat penandaan dari plang kayu warna biru tulisan warna putih dan penandaan patok cat warna merah dengan tulisan warna putih. Terdapat kesesuaian antara penandaan di peta dan penandaan di lapangan.<br>4. Batas Petak Tebangan Sengon pada Register 44 Way Kanan RKTPH tahun 2023 pada Petak 507 terletak pada koordinat S 04° 16' 47,3" dan E 104° 50' 24,5" dan koordinat S 04° 16' 53,8" dan E 104° 50' 24,1" Terdapat penandaan dari plang kayu warna biru |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | tulisan warna putih dan terdapat patok cat warna merah dengan tulisan warna putih. Terdapat kesesuaian antara penandaan di peta dan penandaan di lapangan.<br>5. Batas Petak Tebangan Sengon pada Register 44 Way Kanan RKTPH tahun 2023 pada Petak 507 terletak pada koordinat S 04° 16' 59,1" dan E 104° 50' 21,6". Terdapat penandaan patok cat warna merah dengan tulisan warna putih. Terdapat kesesuaian antara penandaan di peta dan penandaan di lapangan |
| 4 | Verifier 2.2.1.a | : | Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat dokumen RKUPH atau RKUPHHK-HTI PT INHUTANI V jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2018 s/d 2027 telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5045/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.I/2018 tanggal 2 Agustuts 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2018 - 2027 atas nama PT INHUTANI V di Provinsi Lampung dan dilengkapi peta lampiran RKUPHHK-HT Skala 1 : 50.000<br>Dalam dokumen RKUPH yang disahkan, PT Inhutani V Unit Lampung menerapkan sistem siilvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) serta merencanakan penyiapan lahan untuk penanaman periode tahun 2018 – 2027 yaitu :<br>1. Tanaman Pokok<br>a. Jenis Sengon terdiri dari Daur I seluas ± 12.260 Ha dan Daur II seluas ± 12.260 Ha<br>b. Jenis Karet seluas ± 20.364 Ha<br>2. Tanaman Kehidupan :<br>a. Jenis Sengon terdiri dari Daur I seluas ± 3.129 Ha dan Daur II seluas ± 3.129 Ha yang dikombinasikan dengan tanaman jagung.<br>b. Pengembangan tanaman padi seluas ± 289 Ha dan tanaman tebu seluas ± 13.728 Ha |
| 5 | Verifier 2.2.1.b | : | Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri |
| | Nilai | : | *Not Applicable (N/A)* |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung menerapkan sistem Silvikultur THPB untuk membangun HTI, namun pemanfaatan kayu tidak berasal dari hutan kayu alami untuk penyiapan lahannya melainkan dari areal tanaman HTI sebelumnya sehingga tidak melaksanakan penyiapan lahan untuk pembangunan HTI dari lokasi areal pemanfaatan kayu hutan alam yang tumbuh alami |

23. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Verifier 3.1.1. | : | Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung memiliki GANSIPH Penerbit LHP atas nama :<br>a. Yogi Permana Reg. 04210002919 dan Register setelah Uji Kompetensi No. GNS 2063 1965 2022 dengan persetujuan penugasan No. SK.348/BPHPVI/PEPHP/6/2020 dan penempatan GANISPH Penerbit LHP dan Penerbit SKSHHK-KB No. 060135502641<br>b. Mochamad Kadartika Reg. 04210007641 dan Register setelah Uji Kompetensi No. GNS 2063 1959 2022 dengan persetujuan penugasan No. SK.345/BPHPVI/PEPHP/6/2020 dan penempatan GANISPH Penerbit LHP dan SKSHHK-KB No. 065232343095. |

Terdapat SK Kepala Unit Lampung No. 395/IHT-V/Lmp/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penetapan Lokasi Tempat Pengumpulan Kayu (TPK) Tebangan kayu Akasia mangium dan Sengon RKT 2021.

Terdapat Buku Ukur selama periode audit Penilikan Ke-3 (Ketiga) S-PHL (September 2021 – Februari 2023) hanya diterbitkan pada RKTPH tahun 2021. Pada RKTPH tahun 2022 tidak terdapat target penebangan dan pemanfaatan kayu, sedangkan pada RKTPH Tahun 2023 belum terdapat operasional pemanfaatan hasil hutan kayu.

Berdasarkan data produksi pada PT Inhutani V Unit Lampung, pada periode audit (September 2021 – Februari 2023) pada RKTPH Tahun 2021 telah menerbitkan LHP sebanyak 8 (delapan) set LHP kayu Acacia dengan volume sebesar 4.065,72 m3 dengan rincian sebagai berikut :

| No | Periode/ No LHP | Reg. 42 (*A. mangium*) Kab. Way Kanan | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Tanggal | SM | Vol. (M3) |
| 1 | **September 2021** | | | |
| | LHP No. 12/IHT-V/PML-R42/LHP-P.ACC/VIII/2021 | 30/08/2021 | 854,66 | 504,25 |
| | LHP No. 13/IHT-V/PML-R42/LHP-P.ACC/IX/2021 | 14/09/2021 | 361,03 | 213,01 |
| | LHP No. 14/IHT-V/PML-R42/LHP-P.ACC/IX | 20/09/2021 | 904,76 | 533,81 |
| | Sub Total | | 2.120,46 | 1.251,07 |
| 2 | **Oktober 2021** | | | |
| | LHP No. 15/IHT-V/PML-R42/LHP-P.ACC/X/2021 | 29/09/2021 | 932,08 | 549,93 |
| | LHP No. 16/IHT-V/PML-R42/LHP-P.ACC/X/2021 | 11/10/2021 | 955,12 | 563,52 |
| | LHP No.17/IHT-V/PML-R42/LHP-P.ACC/X/2021 | 25/10/2021 | 929,61 | 548,47 |
| | Sub Total | | 2.816,81 | 1.661,92 |
| 3 | **November 2021** | | | |
| | LHP No. 18/IHT-V/PML-R42/LHP-P.ACC/XI/2021 | 09/11/2021 | 964,85 | 569,26 |
| | LHP No. 19/IHT-V/PML-R42/LHP-P.ACC/XI/2021 | 24/11/2021 | 988,93 | 583,47 |
| | Sub Total | | 1.953,78 | 1.152,73 |
| | **Total Tahun 2021** | | 6.891,05 | **4.065,72** |

*Sumber : LHP PT IHT V Lampung (SIPUHH)*

Dari data LMKB/ LMHH PT Inhutani V Unit Lampung diketahui bahwa tidak terdapat stok kayu pada saat audit dan hasil observasi lapangan di Register 42 sudah tidak terdapat stok kayu (NIHIL)

Pemeriksaan SIPUHH Online diketahui bahwa penerbitan LHP telah sesuai dengan ketentuan melalui SIPUHH dan diterbitkan oleh GANISPH Pembuat LHP atas nama Yogi Permana Reg. 04210002919 dan Register setelah Uji Kompetensi No. GNS 2063 1965 2022 dengan persetujuan penugasan No. SK.348/BPHPVI/PEPHP/6/2020 dan penempatan GANISPH Penerbit LHP dan Penerbit SKSHHK-KB No. 060135502641.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Verifier 3.1.2. | : | Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :<br>- TPK hutan ke TPK Antara<br>- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,<br>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Proses dan alur pengangkutan kayu yang dilakukan oleh PT Inhutani V Unit Lampung pada tahun 2019 – 2020 dilakukan tanpa melalui TPK Antara. Kayu yang dipanen/ ditebang dan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | dipotong serta ditumpuk di TPn atau dikumpulkan di TPK Hutan di register 42 dan Register 46 kemudian diangkut langsung menuju Industri Kayu PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper di Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim – Sumatera Selatan.<br>GANISPH PKB-R Penerbit SKSHHK di TPK Hutan :<br>1. Yogi Permana Reg. 04210002919 dan Register setelah Uji Kompetensi No. GNS 2063 1965 2022 dengan persetujuan penugasan No. SK.348/BPHPVI/PEPHP/6/2020 dan penempatan GANISPH Penerbit LHP dan Penerbit SKSHHK-KB No. 060135502641<br>2. Mochamad Kadartika Reg. 04210007641 dan Register setelah Uji Kompetensi No. GNS 2063 1959 2022 dengan persetujuan penugasan No. SK.345/BPHPVI/PEPHP/6/2020 dan penempatan GANISPH Penerbit LHP dan SKSHHK-KB No. 065232343095.<br>Selama periode audit Penilikan Ke-3 (Ketiga) S-PHL (September 2021 s/d Februari 2023), PT Inhutani V Unit Lampung telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu SKSHHK dari TPK Hutan langsung menuju Industri Kayu menuju PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper di Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim – Sumatera Selatan menggunakan sarana angkutan Logging Truk sebanyak 500 Set Dokumen SKSHHK-KB sejumlah 6.406,08 SM dengan Volume 3.779,59 m3.<br>Dokumen SKSHHK diterbitkan oleh Yogi Permana Reg. 04210002919 dengan persetujuan penugasan No. SK.348/BPHPVI/PEPHP/6/2020 dan penempatan GANISPH Penerbit LHP dan Penerbit SKSHHK-KB No. 060135502641<br>Terdapat Berita Acara (BA) Pemeriksaan Stok Opname LHP Kayu *Acacia mangium* No. 174/IHT-V/R42/P.ACC/VII/2022 tangaal 26 Juli 2022 yang menyatakan bahwa stok kayu sejumlah 364,90 M3 yang berada di Register 42 di Petak 108 sejumlah 218,24 m3 dan di Petak 109 sejumlah 146,66 m3 tidak ditemukan karena terdapat penyerobotan lahan dan lahan sudah terbakar atau terindikasi illegal logging pada petak tersebut.<br>Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa di lokasi bekas penebangan pada Petak 108 dan 109 sudah tidak terdapat stok kayu dan sebagian lokasi sudah dalam kelola oleh mitra untuk ditanami singkong bersama masyarakat. |
| 3. | Verifier 3.1.3.a | : | Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. |
| | Nilai | : | *Not Applicable (N/A)* |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung merupakan pemegang PBPH-Hutan Tanaman tidak melakukan pemanfaatan kayu alam sehingga tidak melakukan penandaan kayu dengan memberi label barcode pada batang kayu. Berdasarkan tujuan indikator 3.1.3. bahwa verifier 3.1.3.a diterapkan pada PBPH Hutan Alam. |
| 4. | Verifier 3.1.3.b | : | Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin |
| | Nilai | : | *Not Applicable (N/A)* |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung merupakan pemegang PBPH-Hutan Tanaman tidak melakukan pemanfaatan kayu alam sehingga tidak melakukan penandaan kayu dengan memberi label barcode pada batang kayu. Berdasarkan tujuan indikator 3.1.3. bahwa verifier 3.1.3.b diterapkan pada PBPH Hutan Alam. |
| 5. | Verifier 3.1.4 | : | Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode audit Penilikan Ke-3 (Ketiga) S-PHL (September 2021 s/d Februari 2023), PT Inhutani V Unit Lampung telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu SKSHHK dari TPK Hutan langsung menuju Industri Kayu menuju PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper di Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara |

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Enim – Sumatera Selatan menggunakan sarana angkutan Logging Truk sebanyak 500 Set Dokumen SKSHHK-KB sejumlah 6.406,08 SM dengan Volume 3.779,59 m3<br>Arsip dokumen SKSHHK-KB berada di kantor PT Inhutani V Unit Lampung dan telah diverifikasi lengkap sejumlah 500 SKSHHK-KB yang ditandatangani oleh GANISPH PKB-R Penerbit SKSHHK-KB atas nama Yogi Permana Reg. 04210002919 dan Register setelah Uji Kompetensi No. GNS 2063 1965 2022 dengan persetujuan penugasan No. SK.348/BPHPVI/PEPHP/6/2020 dan penempatan GANISPH Penerbit LHP dan Penerbit SKSHHK-KB No. 060135502641</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td>Verifier 3.2.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Terdapat dokumen SPP dan kode billing atas kewajiban PSDH pada PT Inhutani V Unit Lampung yang diterbitkan/print out dari SI PNBP PT Inhutani V Unit Lampung selama periode audit dengan SPP/ Kode Billing PSDH sejumlah Rp 34.152.048,00. Tidak terdapat SPP Kode Billing atas denda dan tunggakan dari kewajiban pembayaran PSDH atas penerbitan LHP</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7</td><td>Verifier 3.2.1.b</td><td>:</td><td>Bukti Setor DR dan/atau PSDH</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Terdapat dokumen Kode Billing dan NTPN serta Bukti Setor atas kewajiban PSDH pada PT Inhutani V Unit Lampung yang diterbitkan/print out dari Si PNBP PT Inhutani V Unit Lampung selama periode audit dengan Bukti Setor/ NTPN Billing PSDH sejumlah Rp 34.152.048,00.
<table>
<tr><th colspan="2">SPP PSDH</th><th colspan="2">Pembayaran PSDH</th><th rowspan="2">Bank</th></tr>
<tr><th>Kode Billing</th><th>Tanggal</th><th>Jumlah (Rp)</th><th>NTPN</th></tr>
<tr><td>820210831408041</td><td>01-Sep-21</td><td>4.235.700,00</td><td>6EB0B1JNF3E0BET9</td><td>MANDIRI</td></tr>
<tr><td>820210914869791</td><td>15-Sep-21</td><td>1.789.284,00</td><td>E5FDB1JNF3GFUGGV</td><td>MANDIRI</td></tr>
<tr><td>820210920444645</td><td>21-Sep-21</td><td>4.484.004,00</td><td>E669855DEDQ6SKN5</td><td>MANDIRI</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>10.508.988,00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>820211001709932</td><td>01-Oct-21</td><td>4.619.412,00</td><td>34D3A2G4UU5F5LBC</td><td>MANDIRI</td></tr>
<tr><td>820211011762509</td><td>13-Oct-21</td><td>4.733.568,00</td><td>7E88C8N3DO6FJEAD</td><td>MANDIRI</td></tr>
<tr><td>820211025249234</td><td>26 Oct-21</td><td>4.607.148,00</td><td>AB13648VUJAUE0UI</td><td>MANDIRI</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>13.960.128,00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>820211111431269</td><td>12 Nov 2021</td><td>4.781.784,00</td><td>4402F8N3DO9EL335</td><td>MANDIRI</td></tr>
<tr><td>820211125088320</td><td>26 Nov 2021</td><td>4.901.148,00</td><td>7A6E80N9V94C0S20</td><td>MANDIRI</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>9.682.932,00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>34.152.048,00</td><td></td><td></td></tr>
</table>
Sumber : SIPNBP PT IHT V Lampung</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Verifier 3.2.1.c</td><td>:</td><td>Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Perhitungan tarif PSDH dilakukan melalui mekanisme SIPNBP dan dihitung secara otomatis sesuai dengan wilayah PBPH penerbit LHP dan Kode Billingnya yaitu di wilayah Sumatra. Dengan demikian tarif PSDH yang dikenakan dan dibayar oleh PT Inhutani V Unit Lampung telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan jenis sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Sumatra untuk jenis Acacia mangium sebesar Rp 8.400/M3.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Verifier 3.3.1</td><td>:</td><td>Dokumen PKAPT</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan yaitu tertanggal 10 Agustus 2018. |
| 10 | Verifier 3.3.2 | : | Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. |
| | Nilai | : | *Not Applicable (N/A)* |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan dokumen SKSHHK yang diterbitkan selama periode audit dari bulan September 2021 s/d Februari 2023, maka diketahui bahwa PT Inhutani V Unit Lampung tidak melakukan pengangkutan kayu bulat menggunakan tongkang yang ditarik dengan kapal penarik (Tug Boat). Pengangkutan kayu ke Industri melalui jalan darat dengan alat angkutan truk menuju industri di PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper di Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim – Sumatera Selatan |
| 11 | Verifier 3.4.1 | : | Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan Nomor Sertifikat 039.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya. Sertifikat PHL PT Inhutani V Unit Lampung dengan Predikat SEDANG berlaku dari tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2025.<br>Penggunaan Tanda V-Legal atau Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan yaitu pada barcode di log kayu yang bergambar Logo V-Legal bertuliskan Indonesian Legal Wood "039.SPHPL.019-IDN" LPPHPL-019-IDN.<br>Dapat diverifikasi penggunaan logo V-Legal pada dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan Indonesian Legal Wood "039.SPHPL.019-IDN" "LPPHPL-019-IDN" |

24. Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 4.1.1 | : | Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. (Persero) INHUTANI V Rebang Ds dan Muara Dua (Reg. 42, 46 dan 44) di Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung.<br>Dokumen AMDAL telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut Nomor: 158/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 24 Juli 1995 dan dibubuhi stempel Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Hutan Departemen Kehutanan.<br>Melengkapi dokumen AMDAL terdapat dokumen RKL dan RPL PT Inhutani V Unit Lampung yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut Nomor: 158/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 24 Juli 1995 dan dibubuhi stempel Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Hutan Departemen Kehutanan |
| 2. | Verifier 4.1.2.a | : | Dokumen RKL dan RPL. |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT INHUTANI V Unit Lampung memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disusun dengan mengacu pada Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang telah disahkan dan disetujui Komisi Pusat AMDAL Dephut dengan SK No. 158/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 24 Juli 1995 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Verifier 4.1.2.b | : | Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung memiliki laporan pelaksanaan RKL-RPL selama periode audit berupa Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester ke II Tahun 2021; Semester I Tahun 2022; dan Semester II Tahun 2022 serta terdapat nota pengiriman ke Badan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung tanggal 23 Januari 2022 dan 29 Juli 2022.<br>Selama periode audit terdapat implementasi pengelolaan dan pemantauan yang dijumpai di lapangan, namun jumlahnya masih terbatas, di antaranya berupa :<br>- Pemasangan plang-plang himbauan dan larangan seperti plang himbauan dan larangan tentang bahaya kebakaran hutan, penebangan pohon serta budidaya tanaman pangan lainnya serta larangan berburu satwa dilindungi.<br>- Pemantauan Curah Hujan dengan menggunakan ombrometer yang berada di Camp Register 46 dan terdapat plang pemantauan tingkat bahaya kebakaran. Data pemantauan curah hujan diambil setiap hari hujan<br>- Penanganan limbah B3<br>- Pemberdayaan masyarakat dan kelola sosial melalui program kemitraan dalam pemanfaatan lahan di kawasan hutan bersama masyarakat |

25. Prinsip 5 :
    Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 5.1.1.a | : | Pedoman/prosedur K3 |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung memiliki pedoman/panduan K3 sesuai dengan keberadaan dokumen SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) No. 13/SOP-IHT5/2013. Dokumen SOP PT. Inhutani V Unit Lampung dibuat oleh Ali Lukmanul Hakim, S.Hut., diperiksa oleh Ir. Yuli Aryulianti (Sekretaris Perusahaan) dan disetujui oleh Dr. Luther Hatiung, SE. (Direktur).<br>SOP K3 PT Inhutani V Unit Lampung sesuai dengan potensi bahaya dan resiko K3 yang ada dalam operasional di lapangan. Dalam SOP K3 tersebut dicantumkan sebagai penanggungjawab K3 adalah Manager Register bertanggungjawab terhadap K3 di lapangan dan melaporkan kepada Kepala Unit. Sedangkan Kepala Unit bertanggungjawab untuk terselenggaranya K3 di lapangan maupun di kantor dan secara umum Direksi bertanggungjawab untuk terlaksananya K3 di lapangan, di kantor Unit dan di Kantor Direksi Jakarta. |
| 2. | Verifier 5.1.1.b | : | Ketersediaan peralatan K3 |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat Daftar Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT Inhutani V Unit Lampung tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 terdiri dari peralatan K3 berupa APD dan peralatan lainnya disesuaikan dengan potensi bahaya yang ada.<br>Berdasarkan hasil uji petik terkait keberadaan peralatan K3 di lapangan, diantaranya dijumpai peralatan K3 seperti :<br>- Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot, Rompi Kerja yang telah dibagikan kepada Karyawan dan digunakan di lapangan untuk melakukan pekerjaannya..<br>- Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadarluasa yang di pasang pada bangunan kantor, dan Register serta pos jaga.<br>- Tersedia Kotak P3K yang berisi peralatan P3K di kantor<br>- Di sepanjang jalan angkutan dan operasional terdapat rambu – rambu lalu lintas yang berfungsi untuk siaga bagi setiap pengguna jalan. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Verifier 5.1.1.c | : | Catatan kecelakaan kerja |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung memiliki Laporan Triwulan K3 yang berisi tentang catatan kejadian kecelakaan kerja di lingkungan PT Inhutani V Unit Lampung. Laporan dibuat dan ditandatangani oleh Kabag Umum dan Keuangan sebagai lampiran Surat Pengantar Laporan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan Laporan K3 tersebut disebutkan bahwa kejadian kecelakaan kerja di PT Inhutani V Unit Lampung selama periode penilikan adalah NIHIL.<br>Adapun upaya dalam menekan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya adalah :<br>- Melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan utama,<br>- Pemberian APD dan himbauan untuk memakai peralatan APD untuk kegiatan lapangan.<br>- Melakukan Induksi dan penjelasan/ sosialisasi tentang K3 kepada karyawan dan pekerja di lapangan sebelum melakukan pekerjaannya.<br>- Melakukan safety talk rutin kepada karyawan dan safety briefing sebelum bekerja |
| 4. | Verifier 5.2.1 | : | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Pada Lingkungan Karyawan PT Inhutani V Unit Lampung telah terdapat Serikat Pekerja berupa Serikat Karyawan PT Inhutani V (SKIL) yang telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor : 929/SP/JS/II/2023 tanggal 28 Februari 2023.<br>Susunan Pengurus SKIL sebagai berikut<br>- Ketua : Ponimin<br>- Wakil Ketua : Edi Prabowo<br>: Reinaldi Andiano<br>- Bendahara : Istikno<br>: Nurwahyono<br>- Sekretaris : Acep Solahudin<br>: Muhamad Salman Faisal |
| 5. | Verifier 5.2.2 | : | Ketersediaan Dokumen KKB atau PP |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Inhutani V Unit Lampung telah menyusun dan merundingkan KKB/PKB sebagai acuan pengaturan hubungan ketenagakerjaan antara manajemen dan karyawannya. Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan No. 895/IHT-V/PKB/12/2019 dan No. 05/SKIL/PKB/12/2019 untuk Periode 2019 – 2021 telah didaftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja dengan No. 05/SKILL/PKB/12/2019 tanggal 16 Desember 2019.<br>Sehubungan dengan telah habis masa berlakunya PKB pada tahun 2021 maka terdapat penyampaian draft PKB terbaru dari Serikat Karyawan PT Inhutani V (SKIL) pasca merger perusahaan, namun demikian draft tersebut belum disepakati dan selama kesepakatan belum terjadi masih menggunakan PKB sebelumnya.<br>PKB PT Inhutani V terdiri dari 20 BAB dan 75 Pasal yang mengatur/ memuat hak-hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan dan telah dirundingkan bersama dan disetujui antara manajemen PT Inhutani V dan Serikat Karyawan PT Inhutani V pada tanggal 16 Desember 2019. |
| 6. | Verifier 5.2.3 | : | Pekerja yang masih di bawah umur |
| | Nilai | : | Memenuhi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT. Inhutani V Unit Lampung memiliki dokumen Daftar Pegawai Perusahaan periode bulan Februari 2023 yang dibuat oleh Ilfa Hajorani selaku Kasi Umum dan SDM serta diketahui oleh Barnabas D. Loli selaku General Manager PT Inhutani V Unit Lampung.<br>Berdasarkan daftar karyawan tersebut dapat diketahui bahwa karyawan PT. Inhutani V Unit Lampung seluruhnya berjumlah 46 Orang dan tidak terdapat pekerja atau karyawan yang masih di bawah umur.<br>Karyawan yang termuda PT Inhutani V Unit Lampung bernama Dicky Wahyudin yang lahir di Sumedang tanggal 18 Juli 1999 dengan posisi/ jabatan Staf pada Register 18 dan mulai bekerja di PT Inhutani V Unit Lampung tanggal 01 Januari 2020 pada saat yang bersangkutan berusia 20 Tahun 6 Bulan |

## 2. TOTAL NILAI INDIKATOR PHL

| No. | Indikator | Nilai Kinerja Indikator | Nilai Kematangan/ Bobot Indikator | Nilai Kinerja Maksimal Indikator |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.1 | SEDANG | 2 | 3 |
| 2. | 1.2 | SEDANG | 2 | 3 |
| 3. | 1.3 | SEDANG | 2 | 3 |
| 4. | 1.4 | SEDANG | 2 | 3 |
| 5. | 2.1 | SEDANG | 2 | 3 |
| 6. | 2.2 | SEDANG | 2 | 3 |
| 7. | 2.3 | SEDANG | 2 | 3 |
| 8. | 2.4 | SEDANG | 2 | 3 |
| 9. | 2.5 | SEDANG | 2 | 3 |
| 10. | 2.6 | BURUK | 1 | 3 |
| 11. | 3.1 | SEDANG | 2 | 3 |
| 12. | 3.2 | SEDANG | 2 | 3 |
| 13. | 3.3 | SEDANG | 2 | 3 |
| 14. | 3.4 | SEDANG | 2 | 3 |
| 15. | 3.5 | SEDANG | 2 | 3 |
| 16. | 3.6 | SEDANG | 2 | 3 |
| 17. | 4.1 | SEDANG | 2 | 3 |
| 18. | 4.2 | SEDANG | 2 | 3 |
| 19. | 4.3 | SEDANG | 2 | 3 |
| 20. | 4.4 | SEDANG | 2 | 3 |
| 21. | 4.5 | BAIK | 3 | 3 |
| **JUMLAH** | | | **42** | **63** |
| **TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR** | | | 42/63 = 66,67 %<br>tanpa verifier Dominan bernilai Buruk | |

**3. NILAI AKHIR KINERJA PHL**

Total nilai kinerja seluruh indikator = 66,67% dengan tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK, maka nilai akhir kinerja PHL PT INHUTANI V Unit Lampung pada kegiatan penilikan ke-3 adalah **"SEDANG"**

Samarinda, 11 April 2023
LPVI PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

**Ir Kurnia, IPU**
Direktur